

RENCANA KERJA (RENJA) TAHUN 2020



DINAS PERDAGANGAN KABUPATEN BONE

Jln. Laks. Yos. Sudarso No. 29
Tlp/Fax. (0481)21028

KATA PENGANTAR

Rencana Kerja Dinas Perdagangan Kabupaten Bone Tahun 2020 merupakan penjabaran dari Rencana Strategis Dinas Perdagangan Kabupaten Bone 2018-2023 yang disusun sebagai dasar implementasi kebijakan dan program bagi pembangunan perdagangan selama periode 2018-2023 yang menjadi tugas pokok dan fungsi Dinas Perdagangan Kabupaten Bone.

Rencana Kerja ini disusun dengan mempertimbangkan perkembangan lingkungan strategis, baik di lingkungan internal maupun lingkungan eksternal yang saling berpengaruh dalam penyelenggaraan pembangunan perdagangan. Rencana Strategis ini memuat visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, dan program yang akan dilaksanakan selama kurun waktu satu tahun (tahun 2020). Demikian pula indikator pencapaian kinerja dan sasaran yang telah ditetapkan menjadi dasar bagi penilaian akuntabilitas kinerja Dinas Perdagangan pada akhir tahun anggaran 2020.

Demikian Rencana Kerja ini disusun, diharapkan bermanfaat bagi pihak-pihak yang berkepentingan dalam mengembangkan sektor perdagangan Kabupaten Bone

Watampone,

Kepala Dinas Perdagangan
Kabupaten Bone,



Drs. A. CHAERUL SALEH, SE.MM

Pangkat : Pembina Utama Muda, IV/c

NIP. 19610802 198209 1 001

DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR	
DAFTAR ISI	
BAB I. PENDAHULUAN	
1.1. Latar Belakang.....	3
1.2. Landasan Hukum	8
1.3. Maksud dan Tujuan	10
1.4. Sistematika Penulisan	11
BAB II. HASIL EVALUASI PN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU	
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah	12
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah.....	26
2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	29
2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD	31
2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.....	36
BAB III. TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH	
3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional	39
3.2 Tujuan dan sasaran Rencana Kerja Perangkat Daerah	39
3.3 Program dan Kegiatan	41
BAB IV. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH	45
BAB V. PENUTUP	55

BAB I.

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Mendukung terwujudnya good governance, dalam hal ini pertanggungjawaban pemerintah dalam mewujudkan tata pengelolaan pemerintahan yang baik salah satunya adalah mewujudkan pemerintahan yang berorientasi pada hasil (result oriented government). Dengan kata lain pemerintah lebih berfokus pada pencapaian kinerja yang lebih baik. Oleh karena itu Pemerintah Daerah Kabupaten Bone dalam menjamin penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah dalam periode satu tahun berjalan dengan efektif, efisien, dan tepat sasaran maka seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dituntut guna ikut berperan sesuai dengan tugas, pokok dan fungsi.

Sehubungan dengan hal tersebut, berdasarkan pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tatacara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Dinas Perdagangan Kabupaten Bone menyusun Dokumen Renja 2020 yang ditetapkan dengan Surat Keputusan Bupati Bone.

Berangkat dari latar belakang tersebut maka untuk setiap tahun Dinas Perdagangan Kabupaten Bone membuat Renja yang merupakan rencana kegiatan tahunan yang digunakan sebagai pedoman dalam kegiatan tahun tersebut. Dengan adanya RENJA ini, diharapkan sektor perdagangan di Kabupaten Bone dapat berperan secara optimal sebagai fasilitator, dan katalisator dalam meningkatkan perekonomian masyarakat di Kabupaten Bone.

1.1.1. Pengertian Renja

Renja OPD merupakan dokumen perencanaan OPD untuk periode satu tahun. Undang-undang No 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah telah mewajibkan setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk menyusun Rencana Kerja (Renja) OPD sebagai pedoman kerja selama periode 1 (satu) tahun dan berfungsi untuk menerjemahkan perencanaan strategis lima tahunan yang dituangkan

dalam Renstra OPD kedalam perencanaan tahunan yang sifatnya lebih operasional. Dinas Perdagangan Kabupaten Bone merupakan Satuan Kerja Perangkat Daerah (OPD) di Kabupaten Bantul yang mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah dibidang perdagangan sesuai Peraturan Bupati Bone No. 87 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Perdagangan Kabupaten Bone. Agar pelaksanaan tugas yang telah digariskan berjalan dengan efektif dan terarah, maka penyusunan dan penetapan Renja OPD menjadi mutlak, yaitu sebagai pedoman untuk menjadi pedoman di lingkungan OPD dalam menyusun program dan kegiatan prioritas OPD pada tahun anggaran berkenaan.

1.1.2. Proses Penyusunan Renja

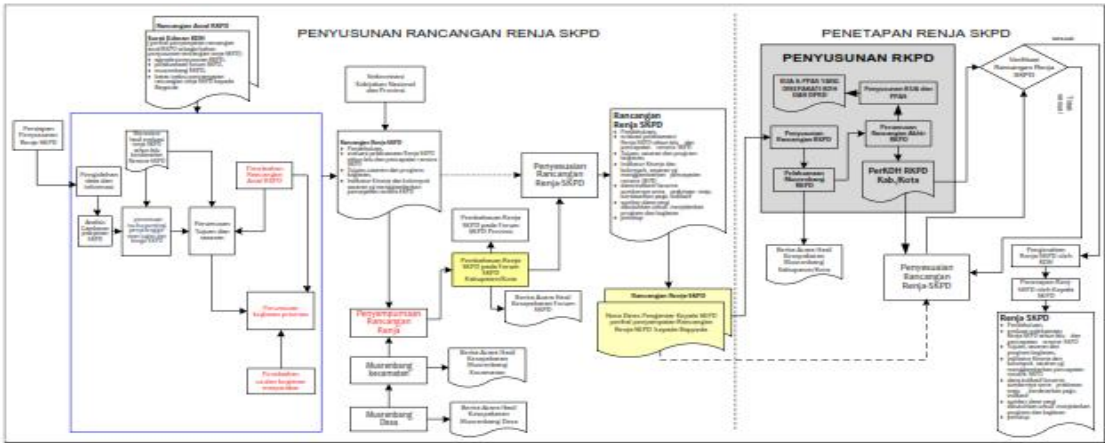
Dalam prosesnya, penyusunan rancangan Renja OPD mengacu pada kerangka arahan yang dirumuskan dalam rancangan awal RKPD. Oleh karena itu penyusunan rancangan Renja OPD diatur secara teknis dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, bagian ketujuh pasal 125 sampai dengan pasal 143 dan penjelasan teknis penyusunan pada Lampiran bagian C. Tata Cara Penyajian Dokumen Rencana Pembangunan Daerah Dan Dokumen Rencana Perangkat Daerah sub bagian C.5. Penyajian Dokumen Renja. Rencana Kerja Perangkat Daerah disusun setiap tahun untuk mendukung pencapaian sasaran pembangunan daerah yang telah ditetapkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

Penyusunan Rancangan renja dapat dikerjakan secara simultan/paralel dengan penyusunan rancangan awal RKPD, dengan fokus melakukan pengkajian terlebih dahulu terhadap kondisi eksisting OPD, evaluasi pelaksanaan Renja OPD tahun-tahun sebelumnya dan evaluasi kinerja terhadap pencapaian Renstra OPD. Tahap penetapan rancangan akhir Rencana Kerja OPD dilakukan dengan pengesahan oleh Kepala Daerah, selanjutnya Kepala OPD menetapkan Renja OPD untuk menjadi pedoman di lingkungan OPD dalam menyusun program dan kegiatan prioritas OPD pada tahun anggaran berkenaan.

Prinsip Penyusunan:

1. Substansi Renja OPD merupakan perbaikan dari materi Rancangan Renja OPD yang disesuaikan dengan Perkada RKPD.

- 2. Program dan kegiatan dirinci menurut sumber pendanaan yang diusulkan.
- 3. Program dan kegiatan yang direncanakan memuat tolok ukur kinerja keluaran, target capaian program/ kegiatan, target keluaran kegiatan, total dana yang diperlukan kegiatan.
- 4. Renja OPD merupakan dokumen resmi program dan kegiatan OPD yang akan dilaksanakan dalam tahun rencana dan merupakan acuan dalam penyusunan RKA OPD setelah memerhatikan nota kesepakatan Kebijakan Umum APBD (KUA) serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS).



Gambar 1.1 Bagan Alur Rancangan Renja OPD Kabupaten/Kota

Adapun tahapan persiapan penyusunan Renja yang dilakukan adalah sebagai berikut :

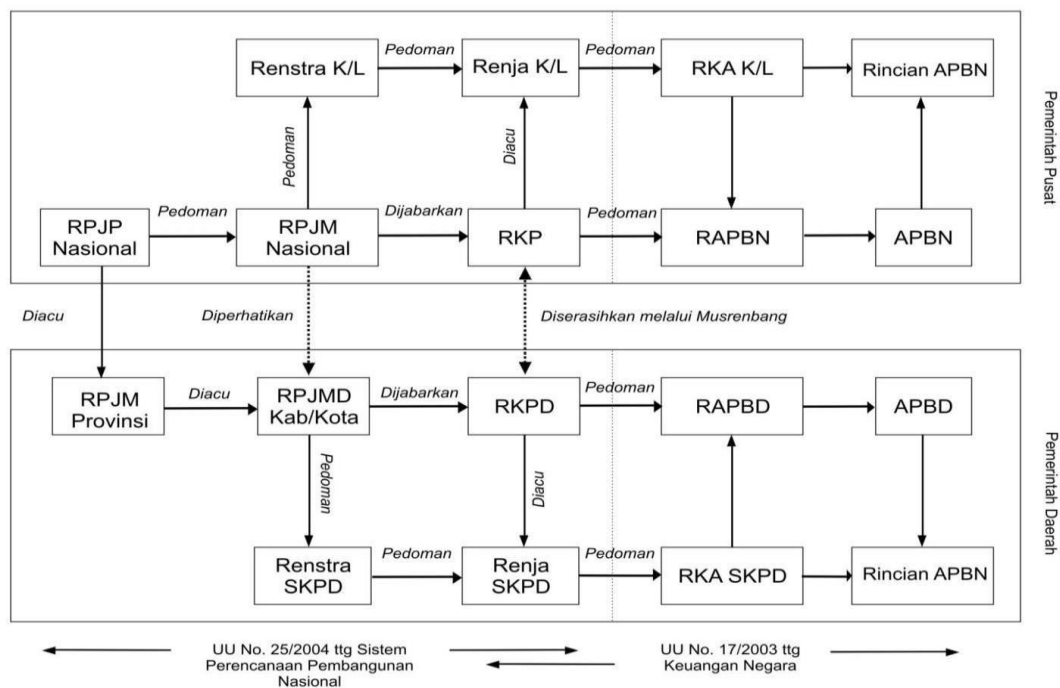
- 1. Persiapan Penyusunan Renja
 - a) Pembentukan Tim Penyusun Renja
 - b) Orientasi mengenai Renja
 - c) Penyusunan Agenda Kerja Tim Renja
 - d) Pengumpulan Data dan Informasi
- 2. Pengolahan Data dan Informasi

Tahap pengolahan data dan informasi bertujuan untuk menyajikan seluruh kebutuhan data dari laporan hasil analisis menjadi informasi yang lebih terstruktur, sistematis, dan relevan bagi pembahasan tim dan pihak-pihak terkait ditiap tahap perumusan penyusunan rancangan Renja.
- 3. Tahap Perumusan Rancangan Renja
 - a) Pengolahan data dan informasi;
 - b) Analisis gambaran pelayanan OPD;

- c) Mereview hasil evaluasi pelaksanaan Renja OPD tahun lalu berdasarkan Renstra OPD;
 - d) Isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi OPD
 - e) Telaah terhadap rancangan awal RKPD
 - f) Perumusan tujuan dan sasaran;
 - g) Penelaahan usulan program dan kegiatan dari masyarakat;
 - h) Perumusan kegiatan prioritas;
 - i) Penyajian awal dokumen rancangan Renja OPD;
 - j) Penyempurnaan rancangan kerja OPD;
 - k) Pembahasan forum OPD; dan
 - l) Penyesuaian dokumen rancangan Renja OPD sesuai dengan prioritas dan sasaran pembangunan tahun rencana dengan mempertimbangkan arah dan kebijakan umum pembangunan daerah.
4. Penyajian dan penyampaian rancangan Renja
 5. Verifikasi dan penyempurnaan rancangan renja yang mengacu pada Rancangan Akhir RKPD
 6. Penetapan Renja.

RPJMD menjadi pedoman dalam penyusunan Renstra Perangkat Daerah yang berwawasan 5 (lima) tahunan. Renstra Perangkat Daerah merupakan penjabaran teknis RPJMD yang berfungsi sebagai dokumen perencanaan teknis operasional dalam menentukan arah kebijakan serta indikasi program dan kegiatan setiap urusan bidang dan atau fungsi pemerintahan untuk jangka waktu 5 (lima) tahunan, yang disusun oleh setiap Perangkat Daerah di bawah koordinasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda).

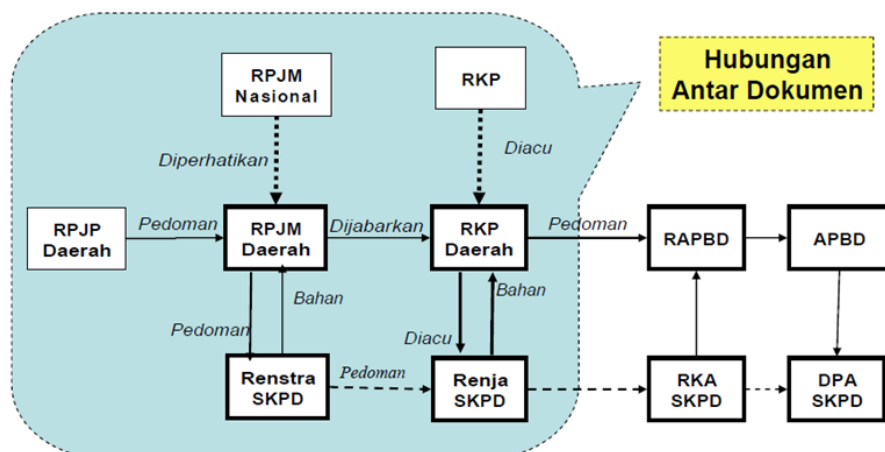
Pelaksanaan RPJMD Tahun 2018-2023 setiap tahun dijabarkan ke dalam RKPD sebagai suatu dokumen perencanaan tahunan daerah yang memuat prioritas program dan kegiatan dari Rencana Kerja Perangkat Daerah. RKPD menjadi acuan dalam pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) yang dilaksanakan secara berjenjang mulai dari tingkat desa/kelurahan, kecamatan, kabupaten. Selanjutnya Perangkat Daerah dengan berpedoman pada Renstra Perangkat Daerah dan RKPD menyusun rencana kerja tahunan berupa Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah. Gambaran tentang hubungan antara RPJMD dengan dokumen perencanaan lainnya sebagai kesatuan sistem perencanaan pembangunan dan sistem keuangan adalah sebagaimana ditunjukkan pada gambar di bawah ini:



Gambar 1.2 Bagan Alur Hubungan Perencanaan Dan Penganggaran

1.1.3 Keterkaitan Antara Renja OPD dengan Dokumen Perencanaan lainnya

Rencana Kerja SKPD sebagai dokumen perencanaan pembangunan tahunan di lingkup Satuan Kerja merupakan penjabaran dari Renstra SKPD yang merupakan rencana pembangunan jangka waktu lima tahunan. Seluruh dokumen tersebut merupakan bagian dari sistem perencanaan pembangunan merupakan sebuah proses yang sistematis dan terpadu. Karena sistem perencanaan pembangunan merupakan sebuah proses yang sistematis dan terpadu, maka seluruh tahapan dan dokumen-dokumen yang dihasilkan harus menunjukkan adanya keterkaitan yang erat antara satu dengan yang lainnya.



Gambar 1.3

Bagan Hubungan Antar Dokumen Perencanaan Daerah

1.2 Landasan Hukum

Landasan hukum penyusunan Rencana Stretegis Dinas Perdagangan adalah:

1. Undang-undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tenatang Keuangan Negara(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tetang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1981 tentang Metrologi Legal
8. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen;
9. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Daerah dengan Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

- 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
 11. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
 12. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103);
 13. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
 14. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 228, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5941);
 15. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
 16. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6056);
 17. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2017 tentang Partisipasi Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 225 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6133);
 18. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia

- Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178); Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencacna Kerja Pemerintah Daerah;
 20. Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 9 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 7 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Bone Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Bone Tahun 2016 Nomor 9);
 21. Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 2 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bone 2012-2032 (Lembaran Daerah Kabupaten Bone Tahun 2013 Nomor 2);
 22. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2019 tentang RPJMD Kabupaten Bone Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Bone Tahun 2019 Nomor 03);
 23. Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 8 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bone Tahun Anggaran 2018; (Lembaran Daerah Kabupaten Bone Tahun 2017 Nomor 8);
 24. Peraturan Bupati Bone Nomor 57 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bone Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Bone Tahun 2019 Nomor 55);

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud dibuatnya Renja Dinas Perdagangan Kabupaten Bone adalah untuk:

- a) menetapkan dokumen perencanaan yang memuat visi, misi, tujuan, strategi, sasaran, kebijakan, program dan kegiatan yang menjadi tolok ukur penilaian kinerja Dinas Perdagangan Kabupaten Bantul dalam melaksanakan tugas dan fungsinya;

- b) bahan evaluasi agar perencanaan dapat berjalan sistematis, komprehensif dan tetap fokus pada pemecahan masalah yang mendasar.

Tujuan penyusunan Renja Dinas Perdagangan tahun 2020 adalah untuk memetakan kebutuhan berbagai sumber di sektor Perdagangan selama 1 (satu) tahun ke depan secara jelas dan transparan yang akan digunakan sebagai acuan/pedoman dalam mewujudkan tujuan pembangunan di sektor perdagangan serta mempermudah melaksanakan kegiatan selama 1 (satu) tahun kedepan, sehingga sumber-sumber daya yang ada di masyarakat dapat dikelola secara optimal.

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika Penyusunan Renja Dinas Perdagangan adalah sebagai berikut :

Bab I Pendahuluan berisikan Latar Belakang , Landasan Hukum, Maksud dan Tujuan serta Sistematika Penulisan penyusunan Renja Dinas Perdagangan Tahun 2020;

Bab II Hasil Evaluasi PN Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun Lalu berisikan tentang review terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja Tahun 2018 dan perkiraan capaian tahun 2019 serta Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Bab III Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah berisikan tentang telaahan terhadap kebijakan nasional, tujuan dan sasaran renja, serta program dan kegiatan.

Bab IV Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah berisikan Program beserta indikator keberhasilan program serta penjelasan kegiatan beserta output dan outcome yang diinginkan.

Bab V Penutup berisikan tentang kesimpulan dari penyusunan Renja Dinas Perdagangan Tahun 2020

BAB II

HASIL EVALUASI PN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Evaluasi pelaksanaan rencana kerja program dan kegiatan pada Dinas Perdagangan Kabupaten Bone Tahun 2018 dan Tahun 2019 menggambarkan tentang perkembangan capaian program kegiatan di masing-masing bidang terkait antara lain Sekretariat, Bidang Sarana Distribusi dan Logistik, Bidang Bahan Pokok dan Strategis, Bidang Usaha Perdagangan, dan Bidang Dagang Kecil, Menengah dan Produk Dalam Negeri.

A. Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun 2018 dan 2019 serta Capaian Renstra SKPD

Pelaksanaan Rencana Kerja (Renja) Tahun 2018 dan Tahun 2019 adalah sejalan atau sesuai dengan Program dan kegiatan yang telah dicanangkan dalam Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perdagangan Kabupaten Bone Tahun 2018-2023, termasuk Program dan kegiatan yang didanai oleh DAU, DAK ataupun APBN.

Tabel 2.1																		
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2019																		
Provinsi Sulawesi Selatan Kabupaten Bone																		
Nama Perangkat Daerah :DINAS PERDAGANGAN KABUPATEN BONE														Lembar :.....				
Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2019		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2017		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (Tahun 2018)						Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2019)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan				
			K	Rp.	K	Rp.	Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2018		Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2018		Tingkat Realisasi (%)			Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (Tahun 2019) Triwulan I		Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)		
							K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.		K	Rp.	K	Rp.	K
1	2	3	4		5		6		7		8=7/6		9		10=(5+7+9)		11=(10/4)	
			K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.
	Urusan Perdagangan																	
006111	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran		178	510,368,700	84	646,818,791	84	666,371,500	84	661,579,902	100.00	99.28	178	510,368,700	41	210,219,912	22.81%	41.19%
006112	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik;	Jumlah Rekening Pembayaran Tagihan Listrik, Telepon/Internet dan Air	36	26,545,100	12	17,953,262	12	22,825,100	12	21,986,441	100.00	96.33	36	26,545,100	9	6,039,648	25.00%	22.75%
006117	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan;	Cakupan Honorarium dan Upah Kerja Administrasi Keuangan	100	101,001,600	12	83,650,000	12	120,374,400	12	116,473,593	100.00	96.76	100	101,001,600	21.35	21,563,048	21.35%	21.35%
006118	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor;	Kantor yang lebih bersih dan baik	1	5,498,000	12	5,000,000	12	5,498,000	12	5,498,000	100.00	100.00	1	5,498,000	0.25	503,000	25.00%	9.15%
006119	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik Penerangan Bangunan Kantor;	Komponen Listrik yang refresentatif	5	2,605,000	12	2,400,000	12	2,605,000	12	2,604,000	100.00	99.96	5	2,605,000	1	520,000	20.00%	19.96%
006119	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang –Undangan;	Tersedianya bahan bacaan (surat Kabar dan Majalah)dan Iklan	12	27,500,000	12	24,775,000	12	37,500,000	12	37,490,000	100.00	99.97	12	27,500,000	3	1,250,000	25.00%	4.55%
006119	Rapat –rapat Kooordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Terlaksananya Raat-rapat koordinasi dalam dan luar daerah	12	256,650,000	12	375,464,729	12	350,000,000	12	349,969,918	100.00	99.99	12	256,650,000	3	133,798,766	25.00%	52.13%
006119	Pelaksanaan Administrasi Perkantoran	Tersedinya ATK, Barang yang diCetak dan digadnakan serta makanan dan minuman harian pegawai	12	90,569,000	12	137,575,800	12	127,569,000	12	127,557,950	100.00	99.99	12	90,569,000	3	46,545,450	25.00%	51.39%
Rata-rata capaian kinerja (%)											100.00	99.00						
Predikat Kinerja											SANGAT TINGGI	SANGAT TINGGI						
006112	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur		33	819,624,000	46	168,549,250	51	303,260,000	52	300,437,100	101.96	99.07	33	819,624,000	1	29,646,750	3.79%	3.62%
0061125	Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah Kendaraan Dinas/Operasional Kemetrologian Daerah	1	450,000,000	1	-	6	123,568,000	6	123,097,000	-	-	1	450,000,000	-	-	0.00%	0.00%
0061127	b. Pengadaan Perlengkapan gedung Kantor	Tersedianya perlengkapan gedung kantor	-	-	2	18,000,000	5	31,750,000	5	31,750,000	100.00	100.00	-	-	-	-	0.00%	0.00%
0061129	c. Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Tersedianya Printer,Komuter PC dan Timbangan dan bejana Ukur	2	271,496,000	6	31,000,000	2	22,300,000	3	22,300,000	150.00	100.00	2	271,496,000	-	-	0.00%	0.00%
0061129	d. Pengadaan Mebeleur	Tersedianya mebeleur	20	8,600,000	1	8,000,000	2	6,970,000	2	6,970,000	100.00	100.00	20	8,600,000	-	-	0.00%	0.00%
0061129	e. Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung	Terpeliharanya rutin/berkala	1	35,228,000	12	17,318,000	12	33,622,000	12	33,265,500	100.00	98.94	1	35,228,000	0.25	8,949,000	25.00%	25.40%
0061129	f. Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendar	Terpeliharannya kendaraan dinas	9	54,300,000	12	85,131,250	12	74,200,000	12	72,204,600	100.00	97.31	9	54,300,000	1	20,697,750	11.11%	38.12%
0061119	g. Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor;	Terpeliharanya peralatan gedung kantor	-	-	12	9,100,000	12	10,850,000	12	10,850,000	100.00	100.00	-	-	-	-	0.00%	0.00%
Rata-rata capaian kinerja (%)											94.00	86.91						
Predikat Kinerja											SANGAT TINGGI	TINGGI						
006115	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur kegiatannya yaitu :		8	95,000,000	8	90,361,000	4	25,200,000	4	25,200,000	100.00	100.00	8	95,000,000	5	29,680,000	62.50%	31.24%
0061153	a. Bimbingan Teknis Impelementasi Peraturan Perundang –Undangan.	Tersedianya Aparat yang lebih Berkompetent	8	95,000,000	8	90,361,000	4	25,200,000	4	25,200,000	100.00	100.00	8	95,000,000	5	29,680,000	62.50%	31.24%
Rata-rata capaian kinerja (%)											100.00	100.00						
Predikat Kinerja											SANGAT TINGGI	SANGAT TINGGI						

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2019	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2017	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (Tahun 2018)						Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2019)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan							
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2018		Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2018		Tingkat Realisasi (%)			Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (Tahun 2019) Triwulan I		Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)					
1	2	3	4		5		6		7		8=7/6		9		10=(5+7+9)		11=(10/4)		
			K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
0006161	Program Peningkatan Pengemabangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan		13	66,100,000	4	-	3	24,400,000	3	22,900,000	100.00	93.85	13	66,100,000	7	16,169,000	58.33%	25.66%	
0006161	Penyusunan Lapran Capaian Kinerja dan IkhtisarRealisasi Kinerja SKPD	Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD LAKIP-LPPD dan Laporan realisasi Keuangan	3	36,200,000	2	-	3	24,400,000	3	22,900,000	100.00	93.85	3	36,200,000	2	4,750,000	66.67%	13.12%	
0006161	Monitoring dan Evaluasi Capaian Kinerja dan Keuangan	Cakupan Monitoring dan Evaluasi Terlaksana	10	29,900,000	2	-	-	-	-	-	-	-	10	29,900,000	5	11,419,000	50.00%	38.19%	
Rata-rata capaian kinerja (%)												50.00	46.93						
Predikat Kinerja												SANGAT RENDAH	SANGAT RENDAH						
0006161	Program Pengembangan Data/ Informasi	Tersusunnya sistem Pelaporan	-	-	1	39,995,000	4	123,792,000	4	123,402,000	100.00	99.68	-	-	-	-	0.00%	0.00%	
0006161	a. Penyusunan dan Analisis Data Informasi Perencanaan Pembangunan	Tersedianya Data Informasi Perencanaan Pembangunan Ekonomi Kecamatan Ajangale	-	-	1	39,995,000	1	30,000,000	1	30,000,000	100.00	100.00	-	-	-	-	0.00%	0.00%	
0006161	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	Tersusunnya Laporan Bulanan	-	-	-	-	2	53,792,000	2	53,402,000	100.00	99.27	-	-	-	-	0.00%	0.00%	
0006161	Pengadaan Aplikasi/Website	Tersedinya Aplikasi Website	-	-	-	-	1	40,000,000	1	40,000,000	100.00	100.00	-	-	-	-	0.00%	0.00%	
Rata-rata capaian kinerja (%)												100.00	99.76						
Predikat Kinerja												SANGAT TINGGI	SANGAT TINGGI						
0006161	Program Penunjang Pemerintahan Umum		3	42,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	3	42,000,000	1	750,000	33.33%	1.79%	
0006181	Penyusunan Rencana Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Penganggaran yang tersusun	3	42,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	3	42,000,000	1	750,000	33.33%	1.79%	
Rata-rata capaian kinerja (%)												-	-						
Predikat Kinerja												SANGAT RENDAH	SANGAT RENDAH						
0006161	Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan meliputi		69	121,576,000	55	90,650,000	59	87,126,000	53	87,043,501	89.83	99.91	69	121,576,000	14	25,996,000	20.29%	21.38%	
0006161	Peningkatan Pengawasan Peredaran Barang dan Jasa	Terlaksananya Pengawasan Peredaran Barang dan Jasa	27	10,000,000	27	-	27	12,800,000	24	12,780,000	88.89	99.84	27	10,000,000	3	5,160,000	11.11%	51.60%	
0006161	d. Operasionalisasi dan Pengembangan UPT Kemetrologian	Terlaksananya Pengawasan Tertib Ukur	27	82,750,000	1	63,025,000	27	43,750,000	24	43,738,501	88.89	99.97	27	82,750,000	3	8,570,000	11.11%	10.36%	
0006161	e. Monitoring Bahan Kebutuhan Pokok;	Terlaksananya Monitoring Bahan Kebutuhan Pokok	5	21,826,000	27	27,625,000	5	30,576,000	5	30,525,000	100.00	99.83	5	21,826,000	4	8,966,000	80.00%	41.08%	
0006161	Penanganan Pengaduan Konsumen	Terselesaikannya Permasalahan Pengaduan Konsumen	10	7,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	10	7,000,000	4	3,300,000	40.00%	47.14%	
Rata-rata capaian kinerja (%)												73.52	79.91						
Predikat Kinerja												SEDANG	TINGGI						
0006161	Program Peningkatan dan Pengembangan Ekspor meliputi :		51	155,376,000	24	156,055,500	25	162,455,000	25	162,452,200	100.00	100.00	51	155,376,000	3	7,480,000	5.88%	4.81%	
0006161	c. Sosialisasi Kebijakan	Meningkatnya Pengetahuan UDKM mengenai Ekspor																	
Rata-rata capaian kinerja (%)												100.00	99.97	20	13,366,000	-	4,950,000	0.00%	37.03%

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2019	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2017	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (Tahun 2018)						Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2019)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan							
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2018		Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2018		Tingkat Realisasi (%)			Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (Tahun 2019) Triwulan I		Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)					
1	2	3	4		5		6		7		8=7/6		9		10=(5+7+9)		11=(10/4)		
			K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
061004	d. Pengembangan Data Base Informasi Potensi Unggulan;	Terdatanya Potensi Unggulan Kabupaten Bone	27	13,010,000	1	9,050,000	1	20,514,000	1	20,514,000	100.00	100.00	27	13,010,000	3	2,530,000	11.11%	19.45%	
061001	g.Promosi Produk Daerah	Terlaksananya Promosi Produk Daerah	4	129,000,000	3	137,545,500	4	131,300,000	4	131,300,000	100.00	100.00	4	129,000,000	-	-	0.00%	0.00%	
Rata-rata capaian kinerja (%)												100.00	99.99						
Predikat Kinerja												SANGAT TINGGI	SANGAT TINGGI						
061000	Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri meliputi		27	5,666,649,260	29	4,363,410,000	48	6,713,057,600	43	6,315,697,356	89.58	94.08	27	5,666,649,260	2	39,925,000	7.41%	0.70%	
061001	a. Pengembangan Sarana dan Prasarana Perdagangan;	Tersedianya Pasar yang Lebih Representatif	3	5,250,000,000	2	4,134,100,000	5	6,302,500,000	5	5,911,636,207	100.00	93.80	3	5,250,000,000	-	28,555,000	0.00%	0.54%	
061002	b. Fasilitasi Kemudahan Perizinan Pengembangan Usaha	Terlaksananya Sosialisasi/Penyuluhan Peninjauan Lokasi Pengemabngan Usaha	10	20,000,000	12	19,060,000	27	31,000,000	22	25,500,000	81.48	82.26	10	20,000,000	2	3,700,000	20.00%	18.50%	
061005	d. Pengembangan Pasar Lelang Daerah;	Jumlah Peserta Pasar Lelang	5	16,000,000	10	16,300,000	8	15,550,000	8	14,600,000	100.00	93.89	5	16,000,000	-	-	0.00%	0.00%	
061008	g. Fasilitasi Pasar Murah.	Terlaksananya Pasar Murah	3	166,820,000	2	98,750,000	3	92,670,000	3	92,670,000	100.00	100.00	3	166,820,000	-	3,820,000	0.00%	2.29%	
061009	Pengembangan Sarana Penunjang Pasar	Tersedianya Sarana Penunjang Pasar yang representatif	1	56,772,480	-	-	-	-	-	-	-	-	1	56,772,480	-	-	0.00%	0.00%	
061010	j. Operasionalisasi Sistem resi gudang;	Terbangunnya Operasionalisasi Perdagangan	1	66,598,500	1	61,000,000	1	58,219,500	1	58,173,049	100.00	99.92	1	66,598,500	-	3,850,000	0.00%	5.78%	
061011	k. Bimbingan Teknis Pengelolah Pasar dan Pergudangan;	Peningkatan Pengetahuan Pengelolaan Pasar dan Pergudangan	3	30,300,000	2	34,200,000	2	26,679,000	2	26,679,000	100.00	100.00	3	30,300,000	-	-	0.00%	0.00%	
061012	Pengembangan Sarana dan Prasarana Perdagangan Pasar Desa	Rehab Pasar Desa	1	60,158,280	-	-	-	-	-	-	-	-	1	60,158,280	-	-	0.00%	0.00%	
061013	a. Pengembangan Sarana dan Prasarana Perdagangan(utang)	Terbangunnya Pasar	-	-	-	-	2	186,439,100	2	186,439,100	100.00	100.00	-	-	-	-	0.00%	0.00%	
Rata-rata capaian kinerja (%)												77.11	76.39						
Predikat Kinerja												TINGGI	TINGGI						
061014	Program Pembinaan Pedagang Kaki Lima dan Asongan		20	10,347,000	-	-	20	11,042,000	20	11,042,000	100.00	100.00	20	10,347,000	-	-	0.00%	0.00%	
061015	Penyuluhan Peningkatan Disiplin Pedagang Kaki Lima dan Asongan	Terlakananya Kegiatan Penyuluhan	20	10,347,000	-	-	20	11,042,000	20	11,042,000	100.00	100.00	20	10,347,000	-	-	0.00%	0.00%	
												100	100						
Predikat Kinerja												SANGAT TINGGI	SANGAT TINGGI						
061016	Program Pembinaan Pedagang Kaki Lima dan Asongan		30	11,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	30	11,000,000	-	-	0.00%	0.00%	
061017	Pembinaan Peningkatan Promosi Produk UDKM	Pembinaan Perdagangan dalam hal Peningkatan Promosi Produk UDKM	20	11,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	20	11,000,000	-	-	0.00%	0.00%	
061018	Pelatihan Clean Produk dan Kemasan UDKM	Terlaksananya Pelatihan Clean Produk dan Kemasan	30	11,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	30	11,000,000	-	-	0.00%	0.00%	
Rata-rata capaian kinerja (%)												0	0						
Predikat Kinerja												SANGAT RENDAH	SANGAT RENDAH						
JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM								8,105,662,100		7,698,712,059									
TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 S.D. PROGRAM)												80.58	80.25						
PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 S.D PROGRAM.....)												TINGGI	TINGGI						

- a. Program kegiatan yang dilaksanakan pada Tahun 2018 sesuai DPA- SKPD Tahun 2018 Nomor 42 Tahun 2018 tanggal 28 Desember 2018 adalah sebagai berikut :

1) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Pada Tahun 2018 Program ini dialokasi dana sebesar Rp.666.371.500,- realisasi Rp.660.579.902,- atau 99.13 % yang terdiri dari 7 Kegiatan yaitu:

- a. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik dengan tujuan pelaksanaan supaya terpenuhinya kebutuhan telepon, air dan listrik dalam setahun, dengan dana DAU Rp. 22.825.100,- dengan realisasi Rp. 21.986.441,- atau sebesar 96.33%;
- b. Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan ditujukan supaya terwujudnya tertib administrasi keuangan dan terlaksananya kegiatan administrasi keuangan, dengan dana DAU Rp. 120.374.400,- dengan realisasi Rp. 115.473.593,- atau sebesar 95.93%;
- c. Penyediaan Jasa Kebesihan Kantor dilaksanakan sebagai tujuan agar terpeliharanya kantor dan tersedianya peralatan serta bahan pembersih kantor dalam setahunnya, dengan dana DAU Rp. 5.498.000,- dengan realisasi Rp. 5.498.000,- atau sebesar 100 %;
- d. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor supaya terpeliharanya komponen listrik kantor yang representatif, dengan dana DAU Rp. 2.605.000,- dengan realisasi Rp. 2.604.000,- atau sebesar 99.96%;
- e. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan ditujukan dengan tersedianya bahan bacaan (surat kabar dan majalah) diharapkan terwujudnya peningkatan sumber daya aparatur pada Dinas Perdagangan Kabupaten Bone, dengan dana DAU Rp. 37.500.000,- dengan realisasi Rp. 37.490.000,- atau sebesar 99,97 %;
- f. Rapat-rapat Kordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah dan Luar Daerah, kegiatan ini ditujukan terlaksananya dan terwujudnya keikutsertaan dalam rapat-rapat kordinasi dan konsultasi baik dalam daerah maupun luar daerah (dalam propinsi dan luar propinsi), dengan dana DAU Rp. 350.000.000,- dengan realisasi Rp. 349.969.918,- atau sebesar 99,99%;
- g. Pelaksanaan Administrasi Perkantoran sebagai upaya peningkatan kelancaran administrasi dan pelayanan perkantoran dengan

tersedianya Alat Tulis Kantor, Barang yang akan dicetak dan digandakan serta tersedianya makan minum pegawai, dengan dana DAU Rp. 127.569.000,- dengan realisasi Rp. 127.557.950,- atau sebesar 99,99%.

2) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur,

Pada Tahun 2018 Program ini dialokasi dana sebesar Rp.303.260.000,- realisasi Rp. 300.437.100,- atau 99,07 % yang terdiri dari 7 Kegiatan yaitu:

- a. Pengadaan Kendaraan Dinas /Operasional yaitu tersedianya pengadaan Kendaraan Roda Dua sebanyak 6 Unit ditujukan untuk meningkatkan kelancaraan pelaksanaan kegiatan , dengan dana DAU Rp. 123.568.000,- dengan realisasi Rp. 123.097.000,- atau sebesar 99.62 %;
- b. Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor dengan tersedianya pengadaan AC sebanyak 5 unit ditujukan untuk meningkatkan kesadaran dan kedisiplinan aparatur, dengan dana DAU Rp. 31.750.000,- dengan realisasi Rp. 31.750.000,- atau sebesar 100 %;
- c. Pengadaan Peralatan Gedung Kantor dengan tersedianya pengadaan notebook sebanyak 1 unit, printer sebanyak 1 unit ditujukan untuk meningkatkan kesadaran dan kedisiplinan aparatur, dengan dana DAU Rp. 22.300.000,- dengan realisasi Rp. 22.300.000,- atau sebesar 100 %;
- d. Pengadaan Mabeleur dengan tersedianya pengadaan 2 Unit Kursi Kerja, dengan dana DAU Rp. 6.970.000,- dengan realisasi Rp. 6.970.000,- atau sebesar 100 %;
- e. Pemeliharaan Rutin/ Berkala Gedung Kantor ditujukan supaya terwujudnya kantor lebih bersih pada pemeliharaan kantor setahunnya, dengan dana DAU Rp. 33.622.000,- dengan realisasi Rp. 33.265.500,- atau sebesar 98.94 %
- f. Pemeliharaan Rutin/ Berkala Kendaraan Dinas/ Operasional ditujukan supaya terlaksananya pemeliharaan sarana dan prasarana aparatur (kendaraan dinas/ operasional) diharapkan tersedianya peningkatan sarana aparatur, dengan dana DAU Rp. 74.200.000,- dengan realisasi Rp. 72.204.600,- atau sebesar 97.31%;
- g. Pemeliharaan Rutin/ Berkala Peralatan Gedung Kantor dilaksanakan supaya tingkat kerusakan peralatan kantor yang layak pakai berkurang sehingga dapat terpeliharanya peralatan kantor dan

lancarnya pelayanan administrasi setahunnya, dengan dana DAU Rp. 10.850.000,- dengan realisasi Rp. 10.850.000,- atau sebesar 100%

3) Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

Pada Tahun 2018 Program ini dialokasi dana sebesar Rp. 25.200.000,- realisasi Rp.25.200.000,- atau 100 % dengan yang terdiri dari 1 Kegiatan yaitu:

- a. Terlaksananya kursus Bintek Aparat pada Kegiatan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan sehingga tercapainya tenaga profesional sesuai bidang tugasnya, dengan dana DAU sebesar Rp. 25.200.000,- realisasi Rp.25.200.000,- atau 100 %

4) Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

Pada Tahun 2018 Program ini dialokasikan anggaran sebesar Rp 24.400.000,- dengan realisasi mencapai Rp 22.900.000 atau sebesar 93.85% yang meliputi 1 kegiatan yaitu :

- a. Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Iktisar Realisasi Kinerja SKPD dengan dana DAU sebesar Rp. 24.400.000,- dengan realisasi Rp. 22.900.000,- atau sebesar 93.85%.

5) Program Pengembangan Data/Informasi

Pada Tahun 2018 Program ini dialokasikan anggaran sebesar Rp 123.792.000,- dengan realisasi mencapai Rp 123.402.000 atau sebesar 99.68% yang meliputi 3 kegiatan yaitu :

- a. Penyusunan dan Analisis Data Informasi Perencanaan Pembangunan Ekonomi dengan dana DAU sebesar Rp. 30.000.000,- dengan realisasi Rp. 30.000.000,- atau sebesar 100%.
- b. Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan dengan dana DAU sebesar Rp. 53.792.000,- dengan realisasi Rp. 53.402.000,- atau sebesar 99.27%.
- c. Pengadaan Aplikasi/Website dengan dana DAU sebesar Rp. 40.000.000,- dengan realisasi Rp. 40.000.000,- atau sebesar 100%.

6) Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri

Pada Tahun 2018 Program ini dialokasikan anggaran sebesar Rp 6.713.057.600,- dengan realisasi mencapai Rp 6.692.896.996 atau sebesar 99.70% Sasaran program adalah Meningkatnya aktivitas perdagangan dalam dan luar negeri dengan hasil yang dicapai Jumlah

Pasar yang di Rehabilitasi. Adapun Kegiatan yang dilaksanakan adalah sebagai berikut :

a. Pengembangan Sarana dan Prasarana Perdagangan;

Kegiatan Pengembangan Sarana dan Prasarana Perdagangan pada Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri ditandai dengan terlaksananya Pembangunan/ Renovasi Pasar . Pembangunan Pasar ini dilaksanakan dengan menggunakan Dana Alokasi Khusus (DAK) untuk Kegiatan Konstruksi dan Dana Alokasi Umum (DAU) untuk dana penunjang lainnya. Pasar yang diharapkan, yaitu pasar yang representatif, bersih dan nyaman.

Pada Tahun 2018 Pembangunan/ Revitalisasi Pasar Rakyat yang dilaksanakan sebanyak 5 Unit Yaitu Pasar Welado Kecamatan Ajangale, Pasar Taretta Kecamatan Amali, Pasar Cenrana Kecamatan Cenrana, Pasar Koppe Kecamatan Bengo, Pasar Pamusureng Kecamatan Bontocani, dengan menggunakan dana DAK-DAU sebesar Rp.6.302.500.000,- dengan realisasi keuangan Tahun 2018 sebesar Rp. 6.284.835.847 atau sebesar 99.72 %.

b. Fasilitasi Kemudahan Perizinan Pengembangan Usaha

Tercapainya Peningkatan Penerimaan Retribusi PAD yang didukung dengan Kegiatan Fasilitasi Kemudahan Perizinan Pengembangan Usaha dengan Target Penerimaan tertentu. Pelaksanaan Kegiatan ini dilakukan dengan cara mendatangi dan memfasilitasi pengusaha yang tersebar di 27 Kecamatan di Kabupaten Bone untuk mengurus izin Usaha (HO). Pada Tahun 2018 dengan dana DAU sebesar Rp.31.000.000,- dengan Realisasi Keuangan sebesar Rp. 29.500.000,- atau sebesar 95.16 %

Beberapa Pencapaian Dinas Perdagangan dalam Peningkatan Penerimaan Retribusi PAD dapat dilihat dari penerimaan Penghargaan dari Bapak Bupati Bone sebagai berikut:

- ❖ Peringkat I Kategori Pengelolaan PAD Terbaik Tahun 2014 dengan pencapaian 129,75 % dengan Target Rp. 400.000.000,- dan pencapaian Rp. 518.995.900,- dengan 6.979 Izin.
- ❖ Peringkat I Kategori Pengelolaan PAD Terbaik Tahun 2015 dengan pencapaian 177,06 % dengan Target Rp. 530.000.000,- dan pencapaian Rp. 938.372.300,- dengan 1.843 Izin.

c. Pengembangan Pasar Lelang Daerah;

Pengembangan Pasar Lelang Daerah dimaksudkan untuk mewujudkan Jaringan Pemasaran dan Harga serta mempromosikan hasil komoditi Unggulan Kabupaten Bone, Maka Kegiatan Pasar Lelang Daerah dilakukan dengan Mengikutsertakan Komoditi Unggulan Daerah Kabupaten Bone dan pelaku usaha/ Calon pengusaha pada Pasar lelang yang dilaksanakan di Makassar. Pada Tahun 2018 kegiatan ini dilaksanakan dengan dana DAU sebesar Rp. 15.550.000,- dengan Realisasi Keuangan sebesar Rp. 14.600.000,- atau sebesar 93.89%

d. Fasilitasi Pasar Murah.

Dalam rangka Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri pada Kegiatan Fasilitasi Pasar Murah yang ditujukan supaya terciptanya atau terwujudnya standarisasi harga yang stabil dan lebih murah sehingga masyarakat utamanya masyarakat ekonomi lemah dapat mendapatkan Sembako dengan harga murah.

Tahun 2018 Pelaksanaan Fasilitasi Pasar Murah dilaksanakan dengan penyerahan Paket Sembako sebanyak 600 Paket kepada masyarakat dan Pelaksanaan Pasar Murah dengan melibatkan Distributor sebanyak 3 Kali yaitu Sebelum Bulan Ramadhan, Sebelum Idhul Fitri dan Sebelum Natal yang di laksanakan di Kecamatan Tanete Riattang, dengan dana DAU sebesar Rp.92.670.000,- dengan realisasi keuangan Rp. 92.670.000,- atau sebesar 100 %;

e. Operasionalisasi Sistem Resi Gudang;

Kegiatan Operasionalisasi Sistem Resi Gudang dilakukan dengan cara mengoperasikan dan memelihara Gudang yang terletak di Kecamatan Dua Boccoe . Tahun 2018 Pelaksanaan Kegiatan Operasionalisasi Sistem Resi Gudang Menggunakan dana DAU sebesar Rp. 58.219.500,- dengan realisasi sebesar Rp. 58.173.049,- atau sebesar 99.92 %

f. Bimbingan Teknis Pengelolah Pasar dan Pergudangan;

Bimbingan Teknis Pengelolah pasar dan Pergudangan di laksanakan dengan tujuan peningkatan Pengetahuan Pengelolah Pasar dan Pergudangan. Bimbingan Teknis ini ditujukan pada Aparat dan

Pengelola Pasar dan Pergudangan. Bimbingan Teknis ini dengan dana DAU sebesar Rp. 26.679.000,- dengan Realisasi Tahun 2018 sebesar Rp. 26.679.000,- atau sebesar 100 %.

- g. Pengembangan Sarana dan Prasarana Perdagangan Rakyat (utang) Kegiatan ini merupakan pembayaran utang Retensi (Pemeliharaan 5%) Pembangunan Pasar pada Tahun 2017 yang dibayarkan pada Tahun 2018 dengan dana DAU sebesar Rp. 186.439.100,- dengan Realisasi Tahun 2018 sebesar Rp. 186.439.100,- atau sebesar 100 %.

7) Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan

Pada Tahun 2018 Program ini dialokasikan anggaran sebesar Rp.87.126.000,- dengan realisasi keuangan sebesar Rp.873.043.501,-. Sasaran program adalah Meningkatnya aktivitas perdagangan dalam dan luar negeri dengan hasil yang dicapai Jumlah Kecamatan yang Mendapatkan Data Pengawasan UTTP. Kegiatan yang dilaksanakan adalah sebagai berikut:

- a. Peningkatan Pengawasan Peredaran Barang dan Jasa;
Kegiatan Peningkatan Pengawasan Peredaran Barang dan Jasa dilaksanakan dengan dana DAU sebesar Rp. 12.800.000,- dan realisasi Keuangan sebesar Rp. 12.780.000,- atau sebesar 99.84 %.
- b. Operasionalisasi dan Pengembangan UPT Kemetrollogian Daerah;
Kegiatan Operasionalisasi dan Pengembangan UPT Kemetrollogian Daerah merupakan kegiatan Pengendalian dan Terwujudnya Tertib Ukur pada Alat Ukur Takar Timbangan dan Perlengkapannya (UTTP), utamanya terhadap Pemilik/ Pengguna dan Penjual BDKT, pelaksanaan pengawasan dalam upaya Peningkatan Pengawasan Kemetrollogian yang bekerja sama dengan Dinas Perdagangan Provinsi Sulawesi Selatan pada Kegiatan Operasionalisasi dan Pengembangan UPT Kemetrollogian Daerah tetap tersebar di 27 Kecamatan. Pada Tahun 2018 Kegiatan ini dilaksanakan dengan dana DAU sebesar Rp. 43.750.000,- dan realisasi Keuangan sebesar Rp. 43.738.501,- atau sebesar 99.97 %.

c. Monitoring Bahan Kebutuhan Pokok;

Tersedianya Data Harga Sembilan Bahan Pokok sebagai wujud dari Standarisasi Harga pada kegiatan Monitoring Bahan Kebutuhan Pokok dalam rangka peningkatan perlindungan terhadap konsumen dengan harga yang stabil dan terjangkau sebagai upaya pengamanan perdagangan dan pada kegiatan ini untuk mempermudah konsumen dan masyarakat pada umumnya maka Data Harga Sembilan Bahan Pokok dapat diakses pada Koran Radar terbitan setiap 1 kali sebulan. Pada Tahun 2018 Kegiatan ini dilaksanakan dengan dana DAU sebesar Rp. 30.576.000,- dan realisasi Keuangan sebesar Rp. 30.525.000,- atau sebesar 99.83 %.

8) Program Peningkatan dan Pengembangan Ekspor

Pada Tahun 2018 Program ini dialokasikan anggaran sebesar Rp.162.455.000,- dengan realisasi keuangan sebesar Rp.162.452.200,-. Kegiatan yang dilaksanakan adalah sebagai berikut:

a. Sosialisasi Kebijakan Penyederhanaan Prosedur dan Dokumen Ekspor dan Impor

Kegiatan Sosialisasi Kebijakan Penyederhanaan Prosedur dan Dokumen Ekspor dan Impor dilaksanakan dengan dana DAU sebesar Rp. 10.641.000,- dan realisasi Keuangan sebesar Rp. 10.638.200,- atau sebesar 99.97%.

b. Pengembangan Data Base Informasi Potensi Unggulan

Kegiatan Pengembangan Data Base Informasi Potensi Unggulan dilaksanakan dengan dana DAU sebesar Rp. 20.514.000,- dan realisasi Keuangan sebesar Rp. 20.514.000,- atau sebesar 100%.

c. Promosi Produk Daerah

Kegiatan Promosi Produk Daerah dilaksanakan dengan cara ikut serta pada kegiatan Pameran Produk Unggulan Kabupaten Bone. Pada Tahun 2018 Pameran yang diikuti adalah Pameran di Balikpapan, Jakarta, Makassar dan di Watampone. Kegiatan ini dilaksanakan dengan dana DAU sebesar Rp. 131.300.000,- dan realisasi Keuangan sebesar Rp. 131.300.000,- atau sebesar 100%.

9) Program Pembinaan Pedagang Kaki Lima dan Asongan

Pada Tahun 2018 Program ini dialokasikan anggaran sebesar Rp.11.042.000,- dengan realisasi keuangan sebesar Rp.11.042.000,-. Kegiatan yang dilaksanakan adalah sebagai berikut:

- a. Penyuluhan Peningkatan Disiplin Pedagang Kaki Lima dan Asongan
 - b. Kegiatan Penyuluhan Peningkatan Disiplin Pedagang Kaki Lima dan Asongan dilaksanakan dengan dana DAU sebesar Rp. 11.042.000,- dan realisasi Keuangan sebesar Rp. 11.042.000,- atau sebesar 100%.
- b. Program kegiatan yang dilaksanakan pada Tahun 2019 sesuai DPA- SKPD Tahun 2019 Nomor 81 Tahun 2018 tanggal 17 Desember 2018 adalah sebagai berikut :
- Program Pelayanan Administrasi Perkantoran dengan kegiatannya :
- 1) Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik dengan dengan dana DAU Rp. 26.545.100,-
 - 2) Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan ditujukan supaya terwujudnya tertib administrasi keuangan dan terlaksananya kegiatan administrasi keuangan, dengan dana DAU Rp. 101.001.600,-
 - 3) Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor sehingga tersedianya peralatan serta bahan pembersih kantor dalam setahunnya, dengan dana DAU Rp. 5.498.000,-
 - 4) Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor supaya komponen listrik kantor terpelihara, dengan dana DAU Rp. 2.605.000,-
 - 5) Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan diharapkan terwujudnya peningkatan sumber daya aparatur pada Dinas Perdagangan Kabupaten Bone, dengan dana DAU Rp. 27.500.000,-
 - 6) Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah dan Luar Daerah, kegiatan yang mendukung terlaksananya dan terwujudnya keikutsertaan dalam rapat-rapat koordinasi dan konsultasi baik dalam daerah maupun luar daerah (dalam propinsi dan luar propinsi), dengan dana DAU Rp. 256.650.000,-
 - 7) Pelaksanaan Administrasi Perkantoran dengan tersedianya Alat Tulis Kantor, Barang yang akan dicetak dan digandakan serta tersedianya makan minum pegawai, dengan dana DAU Rp. 90.569.000,- .
- Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur dengan kegiatan :
- 1) Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional dengan dana DAK Rp. 450.000.000,-

- 2) Pengadaan Peralatan Gedung Kantor dengan pengadaan komputer dan printer, dengan dana DAK dan DAU sebesar Rp. 271.496.000,-
 - 3) Pengadaan Mebeleur dengan dana DAU sebesar Rp. 8.600.000,-
 - 4) Pemeliharaan Rutin/ Berkala Gedung Kantor ditujukan supaya terpeliharanya kantor lebih bersih setahunnya, dengan dana DAU Rp. 35.228.000,-
 - 5) Pemeliharaan Rutin/ Berkala Kendaraan Dinas/ Operasional supaya terlaksananya pemeliharaan sarana dan prasarana aparatur (kendaraan dinas/ operasional), dengan dana DAU Rp. 54.300.000,-
- Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur dengan kegiatannya :
- 1) Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang – undangan dengan tujuan pelaksanaan kegiatan supaya tersediannya tenaga professional dalam melaksanakan bidang tugasnya dengan keikutsertaan dalam bimtek, dengan dana DAU Rp. 95.000.000,-
- Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
- 1) Kegiatan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dengan dana DAU sebesar Rp. 36.200.000,-
 - 2) Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Capaian Kinerja dan Keuangan dengan dana DAU sebesar Rp. 29.900.000,-
- Program Penunjang Pemerintahan Umum :
- 1) Kegiatan Penyusunan Rencana Perangkat Daerah, dengan dana DAU Rp. 42.000.000,-
- Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan dengan kegiatan:
- 1) Peningkatan Pegawasan Peredaran Barang dan Jasa dengan dana DAU sebesar Rp. 10.000.000,-
 - 2) Dalam upaya Pengendalian dan Terwujudnya Tertib Ukur pada Alat Ukur Takar Timbangan dan Perlengkapannya (UTTP) , dengan dana DAU Rp. 82.750.000,- pada Kegiatan Operasionalisasi dan Pengembangan UPT Kemetrolagian Daerah tetap tersebar di 27 Kecamatan.

- 3) Kegiatan Monitoring Bahan Kebutuhan Pokok dengan tersedianya Data Harga Sembilan Bahan Pokok sebagai wujud dari Standarisasi Harga, dengan dana DAU Rp. 21.826.000,-
- 4) Kegiatan Penanganan Pengaduan Konsumen, dengan dana DAU Rp. 7.000.000,-

➤ Program Peningkatan dan Pengembangan Ekspor dengan Kegiatan :

- 1) Sosialisasi Kebijakan Penyederhanaan Prosedur dan Dokumen Ekspor dan Impor dengan dana DAU sebesar Rp. 13.366.000,-
- 2) Pengembangan Data Base Informasi Potensi Unggulan di 27 Kecamatan dengan dana DAU sebesar Rp. 13.010.000,-
- 3) Terlaksananya Promosi Produk Daerah sehingga Produk Kabupaten Bone makin dikenal luas yang didanai oleh DAU sebesar Rp. 129.000.000,- dengan pelaksanaan 4 kali pameran dengan 4 lokasi.

➤ Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri yang kegiatannya yaitu :

- 1) Kegiatan Fasilitas Kemudahan Perizinan Pengembangan Usaha dengan dana DAU sebesar Rp. 20.000.000,-
- 2) Kegiatan Pengembangan Pasar Lelang Daerah ditujukan untuk meningkatkan jaringan pasar utamanya untuk 10 Komoditi Unggulan di Kabupaten Bone dengan dana DAU sebesar Rp. 16.000.000,-
- 3) Kegiatan Fasilitas Pasar Murah yang ditujukan supaya terciptanya atau terwujudnya standarisasi harga yang stabil dan lebih murah sehingga masyarakat utamanya masyarakat ekonomi lemah dapat mendapatkan Sembako dengan harga murah. Dan Pasar Murah dilaksanakan sebanyak 3 kali dan penyerahan Paket Sembako kepada masyarakat dengan dana DAU sebesar Rp. 166.820.000,-
- 4) Kegiatan Pengembangan Sarana Penunjang Pasar dengan dana DAU sebesar Rp. 56.772.480,-
- 5) Kegiatan Pengembangan Sarana dan Prasarana Perdagangan pada Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri ditandai dengan terlaksananya Pembangunan/ Renovasi Pasar sebanyak 3 unit pasar dengan menggunakan dana DAK+DAU sebesar Rp. 5.250.000.000,-
- 6) Kegiatan Operasionalisasi Sistem Resi Gudang dengan dana DAU sebesar Rp. 66.598.500,-

- 7) Bimbingan Teknis Pengelolah Pasar dan Pergudangan dengan dana DAU sebesar Rp. 30.300.000,-.
- 8) Kegiatan Pengembangan Sarana dan Prasarana Perdagangan Pasar Desa, dengan dana DAU Rp. 60.158.280,-
- Program Pembinaan Pedagangn Kaki Lima dan Asongan dengan Kegiatan
 - 1) Penyuluhan Peningkatan Disiplin Pedagang Kaki Lima dan Asongan dengan dana DAU sebesar Rp. 10.347.000,-
- Program Pemberdayaan Usaha Dagang Kecil dan Menengah dengan Kegiatan
 - 1) Pembinaan Peningkatan Promosi Produk UDKM dengan dana DAU sebesar Rp. 11.000.000,-
 - 2) Pelatihan Clean Produk dan Kemasan UDKM dengan dana DAU sebesar Rp. 11.000.000,-

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Penyelenggaraan Kegiatan Pembangunan Perdagangan Kabupaten Bone memiliki peran yang sangat strategis dan penting dalam mendorong perekonomian Kabupaten Bone melalui peningkatan nilai tambah, penciptaan lapangan kerja maupun dalam upaya memberikan kesejahteraan terhadap pedagang dan pengrajin serta masyarakat luas.

Olehnya itu diperlukan pengimplementasian kebijakan pembangunan Perdagangan melalui penyelarasan dan mengsinergikan langkah perencanaan dan pelaksanaan melalui kerja sama yang erat dan berkelanjutan antara Pemerintah (Pusat dan Daerah), pelaku usaha dan masyarakat.

Sehubungan dengan penyelenggaraan Kegiatan pembangunan Perdagangan Kabupaten Bone, maka perlu ditetapkan parameter yang merupakan indikator yang ditetapkan berdasarkan atas azas rasionalitas, realitas dan factual serta dapat diukur secara kuantitatif.

Indikator kinerja sebagai parameter capaian yang berdampak strategis bagi perwujudan visi, misi dan pencapaian tujuan serta sasaran yang ingin diwujudkan dalam pembangunan Perdagangan. Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Perdagangan Kabupaten Bone adalah sebagai berikut :

Tabel 2.2													
Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Perdagangan													
Provinsi Sulawesi Selatan Kabupaten Bone													
No	Indikator	SPM/ Standar Nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis	
				Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	
1	Kontribusi sektor Perdagangan terhadap PDRB		Kontribusi Perdagangan dalam PDRB	11.54	11.77	12.01	12.25	11.76	0	12.01	12.25	Jumlah Kotribusi PDRB dari Sektor Perdagangan	x100%
												Jumlah total PDRB	
2	Persentase Pasar dalam Kondisi baik	-		40%	50%	56%	63%	44%	0	56%	63%	Jumlah Pasar dalam Kondisi Baik	x100%
												Jumlah Seluruh Pasar	
3	Persentase Potensi Komodity Unggulan Kabupaten yang terpublikasi	-		75%	80%	85%	90%	60%	0%	85%	90%	Jumlah Potensi Komodity Unggulan yang terpublikasi	x100%
												Jumlah Keseluruhan Komodity Unggulan	
4	Cakupan bina kelompok pedagang/usaha informal %)	-		5.56	5.67	5.78	5.90	6.42	0.00	5.78	5.90	Jumlah Kelompok Pedagang/Usaha informal yang dibina	x100%
												Jumlah Kelompok Pedagang/Usaha informal	
5	Persentase Alat UTTP yang Lolos Uji Tera Ulang	-		100%	100%	100%	100%	100%	0%	100%	100%	Jumlah Alat UTTP yang Lolos Uji Tera Ulang	x100%
												Jumlah Alat UTTP yang Tera Ulang	
6	Persentase Laporan Konsumen yang diTindak Lanjuti											Jumlah Laporan Konsumen yang di Tindak Lanjuti	x100%
				100%	100%	100%	100%	100%	0%	100%	100%	Jumlah Laporan Konsumen	

Beberapa permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan program dan kegiatan yaitu sebagai berikut:

- a) Banyaknya pedagang kaki lima/ Asongan yang berjualan di tempat yang tidak seharusnya. Sehingga mengganggu Kenyamanan masyarakat lainnya.
- b) Kurangnya kesadaran pedagang kaki lima dalam pengelolaan sampah
- c) Kurangnya kesadaran pelaku usaha untuk mengurus Izin Perdagangan (HO) dikarenakan Jarak antara lokasi tempat usaha dengan lokasi pengurusan izin HO yang jauh
- d) Kurangnya minat pelaku usaha untuk mengikuti Pasar Lelang dikarenakan pengusaha lebih memilih menjual langsung Komoditi yang dimiliki kepada Pengusaha di Makassar.
- e) Pelaku usaha tidak memanfaatkan Gudang yang disediakan dikarenakan Pelaku usaha tidak memahami bagaimana sistem Resi Gudang yang maksud.
- f) Belum terbentuknya struktur pengelola resi gudang yang permanen dikarenakan kurangnya tenaga aparat yang berkompeten.
- g) Masih adanya pedagang nakal yang melakukan pelanggaran yang dapat merugikan konsumen
- h) Kurangnya pengetahuan konsumen atas hak yang harus diterima sebagai konsumen

Solusi yang diambil dalam menyelesaikan masalah diatas adalah sebagai berikut:

- a) Melakukan penyuluhan langsung kepada pedagang kaki lima/Asongan tentang peningkatan disiplin pedagang dalam berjualan.
- b) Melakukan fasilitasi bagi pelaku usaha yang lokasinya jauh dengan cara menjemput dan melakukan sosialisasi secara langsung pada pengusaha.
- c) Mengikut sertakan pelaku usaha dalam kegiatan Pasar lelang yang dilaksanakan di Makassar sehingga membuka pengetahuan Pelaku Usaha bagaimana sistem pelaksanaan Pasar Lelang yang Maksud.
- d) Melakukan Kegiatan Sosialisasi Sistem Resi Gudang pada Pelaku Usaha yang bekerja sama dengan BAPPEPTI (Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi)
- e) Mengikut sertakan Aparat dalam Bimbingan Teknis Pengelolaan Pasar dan Pergudangan.
- f) Melakukan Pengawasan dan Monitoring Barang kebutuhan Pokok seminggu sekali.

- g) Melakukan sosialisasi kepada masyarakat mengenai hak yang harus diterima Konsumen

2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Isu-isu penting penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Perdagangan adalah sebagai berikut:



Tabel 2.3
Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

NO	URUSAN	PERMASALAHAN	ISU STRATEGIS	ARAH KEBIJAKAN	PRORITAS PEMBANGUNAN	PROGRAM PRIORITAS
1	Urusan Pemerintah Pilihan -Perdagangan	1. Banyaknya sarana dan prasarana perdagangan yang kurang memadai 2. Banyaknya barang yang tidak aman yang beredar di masyarakat 3. Masih rendahnya tingkat kesadaran konsumen dan pelaku usaha akan hak dan kewajibannya serta ketentuan yang berlaku. 4. Masih kurangnya permodalan dan infrastruktur pendukung usaha 5. Masih kurangnya pengetahuan UKM dalam mengembangkan Usahanya 6. Masih banyaknya timbangan/alat timbang yang belum memiliki sertifikat tera	1. Kurangnya Sarana dan Prasarana Perdagangan (Pasar) yang Memadai 2. Minimnya instrumen pengawasan barang beredar yang tersedia. 3. Keterbatasan jumlah dan kualifikasi teknis sumber daya manusia. 4. Masih rendahnya tingkat kesadaran konsumen dan pelaku usaha akan hak dan kewajibannya serta ketentuan yang berlaku. 5. Kurangnya publikasi dan sosialisasi aspek perlindungan konsumen 6. Masih kurang networkning dalam pembinaan 7. Masih kurangnya permodalan dan infrastruktur pendukung usaha 8. Masih kurangnya cakupan dan volume pembinaan UDKM 9. Kurang maksimalnya pelaksanaan Tera Ulang (Kemetrologian Daerah)	1. Peningkatan Pengembangan Sarana dan Prasarana Perdagangan 2. Peningkatan Pengawasan Barang dan Perlindungan Terhadap Konsumen 3. Peningkatan Ekonomi Kerakyatan melalui pembinaan UKM 4. Peningkatan Pelayanan Tera Ulang	1. Peningkatan Sarana dan Prasarana Perdagangan 2. Peningkatan Ekonomi Kerakyatan melalui pembinaan UKM 3. Peningkatan Pelayanan Tera Ulang	1. Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri 2. Program Pembinaan Pedagang Kaki Lima dan Asongan 3. Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan

2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD

Tabel 2.4
Review terhadap Rancangan Awal RKPD tahun 2020
Provinsi Sulawesi Selatan Kabupaten Bone

Nama Perangkat Daerah : DINAS PERDAGANGAN						Lembar.....dari.....					
No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu indikatif (Rp.000)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Kebutuhan Dana Rp.000)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	URUSAN PILIHAN				8,872,515,970	URUSAN PILIHAN				8,813,275,560	
	PERDAGANGAN				8,872,515,970	PERDAGANGAN				8,813,275,560	
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran		Cakupan Ketersediaan Pelayanan Administrasi Perkantoran	95 %	561,405,070	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran		Cakupan Ketersediaan Pelayanan Administrasi Perkantoran	95 %	560,201,510	
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik	Dinas Perdagangan	Jumlah Rekening Pembayaran Tagihan Listrik, Telepon/Internet dan Air	36 Rekening	29,199,610	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik	Dinas Perdagangan	Jumlah Rekening Pembayaran Tagihan Listrik, Telepon/Internet dan Air	36 Rekening	29,199,610	
	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Dinas Perdagangan	Jumlah Tenaga Sukarela yang diberikan Jasa/Upah Kerja	25 Kali	105,101,760	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Dinas Perdagangan	Jumlah Tenaga Sukarela yang diberikan Jasa/Upah Kerja	25 Kali	103,920,000	
	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Dinas Perdagangan	Jumlah Paket Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	1 Paket	12,047,800	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Dinas Perdagangan	Jumlah Paket Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	1 Paket	12,026,000	
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/penerangan Bangunan Kantor	Dinas Perdagangan	Jumlah Paket Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	1 Paket	2,865,000	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/penerangan Bangunan Kantor	Dinas Perdagangan	Jumlah Paket Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	1 Paket	2,865,000	
	Penyediaan Bahan Bacaan Dan Peraturan Perundang-undangan	Dinas Perdagangan	Jumlah Pembayaran Media Penyedia Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	120 kali	30,250,000	Penyediaan Bahan Bacaan Dan Peraturan Perundang-undangan	Dinas Perdagangan	Jumlah Pembayaran Media Penyedia Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	120 Kali	30,250,000	
	Rapat-rapat Kordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah dan Luar Daerah	Dinas Perdagangan	Jumlah Pelaksanaan Rapat koordinasi dan Konsultasi dalam dan Luar daerah	120 Kegiatan	282,315,000	Rapat-rapat Kordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah dan Luar Daerah	Dinas Perdagangan	Jumlah Pelaksanaan Rapat koordinasi dan Konsultasi dalam dan Luar daerah	120 Kegiatan	282,315,000	

	Pelaksanaan Administrasi Perkantoran	Dinas Perdagangan	Jumlah Paket Penunjang Pelaksanaan Administrasi Perkantoran	4 Paket	99,625,900	Pelaksanaan Administrasi Perkantoran	Dinas Perdagangan	Jumlah Paket Penunjang Pelaksanaan Administrasi Perkantoran	4 Paket	99,625,900	
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur		Cakupan Realisasi Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	100 %	512,990,800	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur		Cakupan Realisasi Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	100 %	457,900,000	
	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Dinas Perdagangan	Jumlah Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	5 Paket	34,925,000	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Dinas Perdagangan	Jumlah Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	1 Paket	34,925,000	
	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Dinas Perdagangan	Jumlah Pengadaan Peralatan Gedung Kantor (Paket)	3 Paket	13,530,000	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Dinas Perdagangan	Jumlah Pengadaan Peralatan Gedung Kantor (Paket)	3 Paket	13,530,000	
	Pengadaan Mebeleur	Dinas Perdagangan	Jumlah Pengadaan Mabeleur	10 Unit	44,000,000	Pengadaan Mebeleur	Dinas Perdagangan	Jumlah Pengadaan Mabeleur	4 Unit	38,910,000	
	Pemeliharaan Rutin/berkala Gedung Kantor	Dinas Perdagangan	Jumlah Pemeliharaan Gedung Kantor	1 Kegiatan	38,750,800	Pemeliharaan Rutin/berkala Gedung Kantor	Dinas Perdagangan	Jumlah Pemeliharaan Gedung Kantor	1 Kegiatan	38,750,000	
	Pemeliharaan Rutin/berkala Kendaraan Dinas/operasional	Dinas Perdagangan	Jumlah Pemeliharaan Kendaraan Dinas /Operasional	1 Paket	69,850,000	Pemeliharaan Rutin/berkala Kendaraan Dinas/operasional	Dinas Perdagangan	Jumlah Pemeliharaan Kendaraan Dinas /Operasional	1 Paket	69,850,000	
	Pemeliharaan Rutin/berkala Peralatan Gedung Kantor	Dinas Perdagangan	Jumlah Pemeliharaan Peralatan Gedung Kantor (Kegiatan)	3 Kegiatan	11,935,000	Pemeliharaan Rutin/berkala Peralatan Gedung Kantor	Dinas Perdagangan	Jumlah Pemeliharaan Peralatan Gedung Kantor (Kegiatan)	3 Kegiatan	11,935,000	
	Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor	Dinas Perdagangan	Jumlah Pemeliharaan Mebeleur	3 Kegiatan	300,000,000	Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor	Dinas Perdagangan	Jumlah Pemeliharaan Mebeleur	0	250,000,000	
	Program Peningkatan Disiplin Aparatur		Cakupan Peningkatan Disiplin Aparatur	100 %	38,500,000	Program Peningkatan Disiplin Aparatur		Cakupan Peningkatan Disiplin Aparatur	100 %	35,650,000	
	Pengadaan Pakaian Korpri	Dinas Perdagangan	Jumlah Pengadaan Pakaian Korpri	25 Pasang	8,750,000	Pengadaan Pakaian Korpri	Dinas Perdagangan	Jumlah Pengadaan Pakaian Korpri	0	8,400,000	
	Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu	Dinas Perdagangan	Jumlah Penerima Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu	49 Pasang	12,250,000	Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu	Dinas Perdagangan	Jumlah Penerima Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu	49 Pasang	12,250,000	
	Pengadaan Pakaian Dinas PNS beserta Perlengkapannya	Dinas Perdagangan	Jumlah Pengadaan Pakaian Dinas dan Perlengkapannya	50 Pasang	17,500,000	Pengadaan Pakaian Dinas PNS beserta Perlengkapannya	Dinas Perdagangan	Jumlah Pengadaan Pakaian Dinas dan Perlengkapannya	20 Pasang	15,000,000	
	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur		Cakupan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	90 %	104,500,000	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur		Cakupan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	90 %	104,500,000	

	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	Luar Daerah Dalam dan Luar Provinsi	Jumlah PNS yang mengikuti Bimbingan Teknis	8 Orang	104,500,000	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	Luar Daerah Dalam dan Luar Provinsi	Jumlah PNS yang mengikuti Bimbingan Teknis	8 Orang	104,500,000	
	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan		Cakupan Realisasi Penyusunan Dokumen Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	100 %	72,710,000	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan		Cakupan Realisasi Penyusunan Dokumen Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	100 %	72,613,950	
	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Dinas Perdagangan	Jumlah Dokumen Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan yang tersusun	3 Laporan	39,820,000	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Dinas Perdagangan	Jumlah Dokumen Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan yang tersusun	3 Laporan	39,723,950	
	Monitoring dan Evaluasi Capaian Kinerja dan Keuangan	Dinas Perdagangan	Jumlah Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Kinerja dan Keuangan	10 Kegiatan	32,890,000	Monitoring dan Evaluasi Capaian Kinerja dan Keuangan	Dinas Perdagangan	Jumlah Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Kinerja dan Keuangan	10 Kegiatan	32,890,000	
	Program Penunjang Pemerintahan Umum		Cakupan Realisasi Kegiatan Penunjang Pemerintahan Umum	100 %	46,200,000	Program Penunjang Pemerintahan Umum		Cakupan Realisasi Kegiatan Penunjang Pemerintahan Umum	100 %	46,200,000	
	Penyusunan Rencana Perangkat Daerah	Dinas Perdagangan	Jumlah Dokumen Perencanaan Kinerja dan Anggaran yang tersusun	7 Dokumen	46,200,000	Penyusunan Rencana Perangkat Daerah	Dinas Perdagangan	Jumlah Dokumen Perencanaan Kinerja dan Anggaran yang tersusun	7 Dokumen	46,200,000	
	Program Perlindungan Konsumen Dan Pengamanan Perdagangan		Cakupan Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan	90 %	125,000,000	Program Perlindungan Konsumen Dan Pengamanan Perdagangan		Cakupan Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan	90 %	125,000,000	
	Peningkatan Pengawasan Peredaran Barang Dan Jasa	Tersebar di Kecamatan Kota	Jumlah Kegiatan Pengawasan Peredaran Barang dan Jasa	24 Kegiatan	25,000,000	Peningkatan Pengawasan Peredaran Barang Dan Jasa	Tersebar di Kecamatan Kota	Jumlah Kegiatan Pengawasan Peredaran Barang dan Jasa	24 Kegiatan	25,000,000	
	Monitoring Bahan Kebutuhan Pokok	5 Pasar dalam kota	Jumlah Laporan Harga Kebutuhan Pokok	48 Laporan	40,000,000	Monitoring Bahan Kebutuhan Pokok	5 Pasar dalam kota	Jumlah Laporan Harga Kebutuhan Pokok	48 Laporan	40,000,000	
	Penanganan Pengaduan Konsumen	Dinas Perdagangan	Jumlah Laporan Penyelesaian Permasalahan Pengaduan Konsumen	1 Laporan	20,000,000	Penanganan Pengaduan Konsumen	Dinas Perdagangan	Jumlah Laporan Penyelesaian Permasalahan Pengaduan Konsumen	1 Laporan	20,000,000	
	Pengawasan Alat UUTP dan BDKT	Tersebar di 27 Kecamatan	Jumlah Alat-alat UUTP yang di Tera	100 Unit	40,000,000	Pengawasan Alat UUTP dan BDKT	Tersebar di 27 Kecamatan	Jumlah Alat-alat UUTP yang di Tera	100 Unit	40,000,000	
	Program Peningkatan Dan Pengembangan Ekspor		Persentase Ketersediaan Data Potensi Unggulan	85 %	170,913,600	Program Peningkatan Dan Pengembangan Ekspor		Persentase Ketersediaan Data Potensi Unggulan	85 %	170,913,600	
	Sosialisasi Kebijakan Penyederhanaan Prosedur Dan Dokumen Ekspor Dan Impor	Dinas Perdagangan	Jumlah Peserta Sosialisasi Kebijakan Penyederhanaan Prosedur Dan Dokumen Ekspor Dan Impor	20 Orang	14,702,600	Sosialisasi Kebijakan Penyederhanaan Prosedur Dan Dokumen Ekspor Dan Impor	Dinas Perdagangan	Jumlah Peserta Sosialisasi Kebijakan Penyederhanaan Prosedur Dan Dokumen Ekspor Dan Impor	20 Orang	14,702,600	

	Pengembangan Data Base Informasi Potensi Unggulan	Dinas Perdagangan	Jumlah Dokumen Data Potensi Unggulan Kabupaten Bone	1 Dokumen	14,311,000	Pengembangan Data Base Informasi Potensi Unggulan	Dinas Perdagangan	Jumlah Dokumen Data Potensi Unggulan Kabupaten Bone	1 Dokumen	14,311,000	
	Promosi Produk daerah	Dalam dan Luar Daerah	Jumlah Pelaksanaan Promosi Produk Daerah	4 Kegiatan	141,900,000	Promosi Produk daerah	Dalam dan Luar Daerah	Jumlah Pelaksanaan Promosi Produk Daerah	4 Kegiatan	141,900,000	
	Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negri		Cakupan Rehabilitasi dan Revitalisasi Pasar	12 %	6,854,714,800	Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negri		Cakupan Rehabilitasi dan Revitalisasi Pasar	12 %	6,854,714,800	
	Kemudahan Perijinan Pengembangan Usaha	Watampone	Jumlah Kegiatan Sosialisasi/ Penyuluhan dan Peninjauan Lokasi Pengembangan Usaha	1 Kegiatan	22,000,000	Kemudahan Perijinan Pengembangan Usaha	Watampone	Jumlah Kegiatan Sosialisasi/ Penyuluhan dan Peninjauan Lokasi Pengembangan Usaha	1 Kegiatan	22,000,000	
	Pengembangan Pasar Lelang Daerah	Luar Daerah dalam Provinsi	Jumlah Peserta Lelang	5 Orang	17,600,000	Pengembangan Pasar Lelang Daerah	Luar Daerah dalam Provinsi	Jumlah Peserta Lelang	5 Orang	17,600,000	
	Pasar Murah	3 Kecamatan	Jumlah Pelaksanaan Kegiatan Pasar Murah yang dilaksanakan	3 Kegiatan	175,161,000	Pasar Murah	3 Kecamatan	Jumlah Pelaksanaan Kegiatan Pasar Murah yang dilaksanakan	3 Kegiatan	175,161,000	
	Pengembangan Sarana Penunjang Pasar	5 Kecamatan	Jumlah Sarana Penunjang Pasar yang terbangun	5 Unit	283,862,400	Pengembangan Sarana Penunjang Pasar	5 Kecamatan	Jumlah Sarana Penunjang Pasar yang terbangun	1 Unit	283,862,400	
		Desa Lebbae (Kecamatan Ajangale)					Desa Lebbae (Kecamatan Ajangale)				
		Desa Pacing (Kecamatan Awangpone)					Desa Pacing (Kecamatan Awangpone)				
		Kelurahan Maccope					Kelurahan Maccope				
		Pasar Mare					Pasar Mare				
	Pengembangan Sarana dan Prasarana Perdagangan Rakyat	3 Kecamatan	Jumlah Pasar Baru yang terbangun	3 Unit	5,775,000,000	Pengembangan Sarana dan Prasarana Perdagangan Rakyat	3 Kecamatan	Jumlah Pasar Baru yang terbangun	1 Unit	5,775,000,000	
		Desa Patimpeng (Kecamatan Patimpeng)					Desa Patimpeng (Kecamatan Patimpeng)				
		Dusun Muttiara (Kecamatan Lamuru)					Dusun Muttiara (Kecamatan Lamuru)				
		Lerang I (Kecamatan Cina)					Lerang I (Kecamatan Cina)				
		Lingkungan Camming (Kecamatan Libureng)					Lingkungan Camming (Kecamatan Libureng)				
		Tacipi (Kecamatan Ulaweng)					Tacipi (Kecamatan Ulaweng)				

	Sistem Resi Gudang	Kecamatan Dua Bocoe	Jumlah Pemeliharaan gudang SRG dalam setahun	2 Kegiatan	250,000,000	Sistem Resi Gudang	Kecamatan Dua Bocoe	Jumlah Pemeliharaan gudang SRG dalam setahun	2 Kegiatan	250,000,000	
	Bimbingan Teknis Pengelola Pasar dan Pergudangan	Luar Daerah	Jumlah Bimtek Pengelola Pasar yang diikuti	1 Kegiatan	30,300,000	Bimbingan Teknis Pengelola Pasar dan Pergudangan	Luar Daerah	Jumlah Bimtek Pengelola Pasar yang diikuti	1 Kegiatan	30,300,000	
	Pengembangan Sarana dan Prasarana Perdagangan Pasar Desa	5 Kecamatan	Jumlah Pasar Desa yang di Rehabilitasi	5 Unit	300,791,400	Pengembangan Sarana dan Prasarana Perdagangan Pasar Desa	5 Kecamatan	Jumlah Pasar Desa yang di Rehabilitasi	1 Unit	300,791,400	
		Desa Pacing					Desa Pacing				
		Desa Parippung (Kecamatan Barebbo)					Desa Parippung (Kecamatan Barebbo)				
		Desa Tadang Palie (Kecamatan Ulaweng)					Desa Tadang Palie (Kecamatan Ulaweng)				
		Dusun II (Kecamatan Awangpone)					Dusun II (Kecamatan Awangpone)				
		Dusun III (Kecamatan Awangpone)					Dusun III (Kecamatan Awangpone)				
		DUSUN MATAJANG (Kecamatan Ponre)					DUSUN MATAJANG (Kecamatan Ponre)				
		Dusun Mauleng (Kecamatan Tellu Siattinge)					Dusun Mauleng (Kecamatan Tellu Siattinge)				
		Dusun Pajjia (Kecamatan Sibulue)					Dusun Pajjia (Kecamatan Sibulue)				
		Dusun Paku (Kecamatan Bonto Cani)					Dusun Paku (Kecamatan Bonto Cani)				
		Dusun Tinco (Kecamatan Libureng)					Dusun Tinco (Kecamatan Libureng)				
		Dusun Tobenteng (Kecamatan Amali)					Dusun Tobenteng (Kecamatan Amali)				
		Kalampange (Kecamatan Barebbo)					Kalampange (Kecamatan Barebbo)				
		Keluraha Maroangng (Kecamatan Sibulue)					Keluraha Maroangng (Kecamatan Sibulue)				
		MATTIROWALIE (Kecamatan Tellu Siattinge)					MATTIROWALIE (Kecamatan Tellu Siattinge)				
	Program Pembinaan Pedagang Kaki Lima Dan Asongan		Cakupan Bina Pedagang Kaki Lima dan Asongan	30 %	361,381,700	Program Pembinaan Pedagang Kaki Lima Dan Asongan		Cakupan Bina Pedagang Kaki Lima dan Asongan	30 %	361,381,700	
	Kegiatan Penyuluhan Peningkatan Disiplin Pedagang Kakilima Dan Asongan	Dinas Perdagangan	Jumlah Peserta Penyuluhan Peningkatan Disiplin Pedagang Kakilima Dan Asongan	20 Orang	11,381,700	Kegiatan Penyuluhan Peningkatan Disiplin Pedagang Kakilima Dan Asongan	Dinas Perdagangan	Jumlah Peserta Penyuluhan Peningkatan Disiplin Pedagang Kakilima Dan Asongan	20 Orang	11,381,700	
	Kegiatan Penataan Tempat Berusaha Bagi Pedagang Kakilima Dan Asongan	Kecamatan Tellu Siattinge	Jumlah Paket Bantuan Pedagang kaki Lima dan Asongan	2 Paket	350,000,000	Kegiatan Penataan Tempat Berusaha Bagi Pedagang Kakilima Dan Asongan	Kecamatan Tellu Siattinge	Jumlah Paket Bantuan Pedagang kaki Lima dan Asongan	0	350,000,000	
	Program Pemberdayaan Usaha Dagang Kecil dan Menengah		Cakupan Bina Usaha/UKM	30 %	24,200,000	Program Pemberdayaan Usaha Dagang Kecil dan Menengah		Cakupan Bina Usaha/UKM	30 %	24,200,000	
	Pembinaan Peningkatan Promosi Produk UDKM	Dinas Perdagangan	Jumlah Peserta Pembinaan Peningkatan Promosi Produk UDKM	20 Orang	12,100,000	Pembinaan Peningkatan Promosi Produk UDKM	Dinas Perdagangan	Jumlah Peserta Pembinaan Peningkatan Promosi Produk UDKM	20 Orang	12,100,000	
	Pelatihan Clean Produk dan Kemasan UDKM	KECAMATAN TANETE RIATTANG TIMUR	Jumlah Peserta Pelatihan Clean Produk dan Kemasan	20 Orang	12,100,000	Pelatihan Clean Produk dan Kemasan UDKM	KECAMATAN TANETE RIATTANG TIMUR	Jumlah Peserta Pelatihan Clean Produk dan Kemasan	20 Orang	12,100,000	

Dari Tabel diatas dapat dilihat bahwa antar rancangan awal RKPD berbeda dengan hasil analisis kebutuhan hal ini di karenakan beberapa hal yaitu :

- a) Tidak semua usulan hasil musrenbang dapat diakomodir karena anggaran yang diberikan tidak mencukupi untuk membiayai semua usulan
- b) Dana Alokasi Khusus yang dialokasikan untuk Dinas Perdagangan dalam hal Revitalisasi Pasar Rakyat sebesar Rp. 2.000.000.000,- untuk 1 Lokasi pasar
- c) Setelah melakukan tinjauan atas usulan yang masuk dapat di ambil kesimpulan lokasi yang perlu di dahulukan dengan pertimbangan kondisi yang tidak memungkinkan.

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Dalam membuat Program dan Kegiatan Dinas perdagangan tetap memperhatikan usulan para pemangku pemangku kepentingan, baik dari kelompok masyarakat terkait langsung dengan pelayanan, LSM, asosiasi-asosiasi, perguruan tinggi maupun dari kecamatan yang langsung ditujukan kepada Perangkat Daerah Kabupaten maupun berdasarkan hasil pengumpulan informasi Perangkat Daerah Kabupaten dari penelitian lapangan dan pengamatan pelaksanaan Musrenbang Kabupaten. Usulan Program diatas sesuai dengan salah satu isu strategis Dinas Perdagangan yaitu Kurangnya Sarana dan Prasarana Perdagangan (Pasar) yang Memadai dengan atah kebijakan Peningkatan Pengembangan Sarana dan Prasarana Perdagangan. Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat meliputi Usulan Kecamatan pada Musrenbang Kecamatan dan Pokok Pikiran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 2.5
Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2020
Provinsi Sulawesi Selatan Kabupaten Bone

Nama Perangkat Daerah : Dinas Perdagangan Kabupaten Bone					
No	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ Volume	Catatan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Pokok Pikiran Dewan					
1	Pembangunan Pasar Desa Cakkeware Kec.	Awangpone	Jumlah Pasar yang direhab	1 Unit	Golkar
2	Pembangunan pasar Camming Kec. Libureng	Libureng	Jumlah Pasar yang direhab	1 Unit	Nasdem
3	Penambahan los pasar/ panggung pasar Desa Mallari Kec. Awangpone	Awangpone	Jumlah Pasar yang direhab	1 Unit	Nasdem
4	Pengadaan los Desa Mallari Kec. Awangpone	Awangpone	Jumlah Pasar yang direhab	1 Unit	Nasdem
5	Rehabilitasi pasar 1 unit Desa Bulumpare Kec.	Awangpone	Jumlah Pasar yang direhab	1 Unit	Nasdem
6	Rehabilitasi pasar 1 unit Kelurahan Maccope Kec.	Awangpone	Jumlah Pasar yang direhab	1 Unit	Nasdem
7	Perbaikan sarana/ Renovasi pasar Bana Desa	Bontocani	Jumlah Pasar yang direhab	1 Unit	PAN
Musrenbang Kecamatan					
1	Rehabilitasi Pasar Lerang	Lerang I	Jumlah Pasar yang direhab	1 Unit	Kecamatan Cina
2	Pengembangan Sarana dan Prasarana Perdagangan Rakyat	Pasar Mare	Jumlah Pasar yang direhab	1 Unit	Kecamatan Mare
3	Rehap Pasar Desa Parippung	Desa Parippung	Jumlah Pasar yang direhab	1 Unit	Kecamatan Barebbo
4	Rehab Pasar Desa Kajaolaliddong	Kalampange	Jumlah Pasar yang direhab	1 Unit	Kecamatan Barebbo
5	Rehab Berat Pasar Kelurahan Maroanging	Keluraha	Jumlah Pasar yang direhab	2 Paket	Kecamatan Sibulue
6	Rehabilitasi Pasar Benteng	Dusun Pajjia	Luasan Pasar yang direhab	800 M2	Kecamatan Sibulue
7	Rehab Pasar Dusun Matajang	Dusun Matajeng	Jumlah Pasar yang direhab	1 PAKET	Kecamatan Ponre
8	Rehabilitasi Pasar Desa	Kelurahan Maccope	Jumlah Pasar yang direhab	1 Kelompok	Kecamatan Awangpone
9	Pengembangan Sarana Penunjang Pasar	Desa Pacing	Jumlah Pasar yang direhab	1 Paket	Kecamatan Awangpone
10	Rehabilitasi Pasar Desa	Dusun II	Jumlah Pasar yang direhab	1 Unit	Kecamatan Awangpone
11	Rehab Pasar Desa	Dusun III	Jumlah Pasar yang direhab	1 Paket	Kecamatan Awangpone
12	Rehabilitasi Pasar Kecamatan	Tacipi	Jumlah Pasar yang direhab	1 Paket	Kecamatan Ulaweng

13	Rehabilitasi Pasar Desa	Desa Tadang Palie	Jumlah Pasar yang direhab	1 Paket	Kecamatan Ulaweng
14	Pembangunan Penunjang Pasar	Dusun Muttiara	Jumlah Pasar yang direhab	1 Paket	Kecamatan Lamuru
15	Rehabilitasi Pasar Rakyat Camming	Lingkungan	Jumlah Pasar yang direhab	1 Unit	Kecamatan Libureng
16	Rehab Pasar Tinco	Dusun Tinco	Jumlah Pasar yang direhab	1 Paket	Kecamatan Libureng
17	Penataan Tempat Berusaha bagi Pedagang	Lingkungan Tokaseng'	Jumlah Paket bantuan	20 UNIT	Kecamatan Tellu Siattinge
18	Pengembangan Sarana Penunjang Pasar	Mattirowalie	Jumlah Pasar yang direhab	5 Unit	Kecamatan Tellu Siattinge
19	Pengembangan Sarana Penunjang Pasar	Dusun Mauleng	Jumlah Pasar yang direhab	1 Unit	Kecamatan Tellu Siattinge
20	Pembangunan Drainase Pasar Tanrung	Desa Lebbae	Luasan Pasar yang direhab	400 Meter	Kecamatan Ajangale
21	Rehab sedang/berat Pasar Inpres Tobenteng	Dusun Tobenteng	Jumlah Pasar yang direhab	1 paket	Kecamatan Amali
22	Rehabilitasi Pasar Desa Patimpeng	Desa Patimpeng	Jumlah Pasar yang direhab	1 Paket	Kecamatan Patimpeng
23	Rehabilitasi Pasar Desa	Dusun Paku	Jumlah Pasar yang direhab	1 Paket	Kecamatan Bonto Cani



BAB III

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Arah Kebijakan dan Priotitas Nasional yaitu:

1. Pembangunan manusia melalui pengurangan kemiskinan dan peningkatan pelayanan dasar
2. Pengurangan kesenjangan antar wilayah melalui penguatan konektivitas dan kemaritiman
3. Peningkatan nilai tambah ekonomi melalui pertanian, industri, dan jasa produktif
4. Pemantapan ketahanan energi, pangan dan sumberdaya air melalui pelestarian lingkungan
5. Stabilitas keamanan nasional dan kesuksesan pemilu

Berdasarkan Tugas Pokok dan Fungsi, Dinas Perdagangan Kabupaten Bone mendukung prioritas pembangunan nasional yaitu Peningkatan nilai Tambah Ekonomi melalui Pertanian, Industri dan Jasa Produktif. Peningkatan nilai tambah ekonomi yang dilakukan oleh Dinas Perdagangan adalah menyangkut peningkatan nilai tambah ekonomi melalui Jasa Produktif hal ini didukung oleh pelaksanaan Program dan Kegiatan yaitu Program Peningkatan dan Pengembangan Ekspor, Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri, dan Program Pembinaan Pedagang Kaki Lima dan Asongan yang mana tujuan pelaksanaan program tersebut adalah peningkatan nilai tambah Ekonomi

3.2 Tujuan dan sasaran Rencana Kerja Perangkat Daerah

A. Tujuan

Untuk mewujudkan Visi dan Misi Kabupaten Bone Periode 2018-2023 yang dijembatani melalui Tupoksi Dinas Perdagangan melalui Misi 1 Meningkatkan Tatakelola Pemerintah yang baik, bersih dan bebas korupsi, kolusi dan Nepotisme (KKN) dan Misi 2 yaitu Mengembangkan Kemandirian Ekonomi dan Meningkatkan Taraf hidup Masyarakat, maka tujuan yang hendak dicapai dalam membangun sektor perdagangan periode 2018-2023 yaitu:

1. Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah

2. Meningkatkan Kinerja Perekonomian Daerah dari Sektor Perdagangan

B. Sasaran

Dengan mengacu pada Misi dan Tujuan yang telah ditetapkan, maka sasaran yang akan dicapai di Tahun 2020 mendatang adalah sebagai berikut :

- a. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Urusan Perdagangan
- b. Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi dari sektor Perdagangan
- c. Meningkatnya Perlindungan Konsumen

C. Strategi

Strategi adalah langkah berisikan program-program sebagai prioritas pembangunan Daerah/Perangkat Daerah untuk mencapai sasaran.

Dalam rangka mewujudkan pencapaian tujuan dan sasaran tahun 2020, dibutuhkan strategi dan kebijakan Dinas Perdagangan Kabupaten Bone yang mengacu kepada visi dan misi yang telah ditetapkan. Strategi dimaksud selanjutnya akan menjadi dasar untuk perumusan program dan kegiatan yang menjadi tugas pokok dan fungsi Dinas Perdagangan Kabupaten Bone

Strategi Dinas Perdagangan Kabupaten Bone ditetapkan sebagai berikut:

1. Peningkatan Capaian Kinerja Urusan Perdagangan
2. Peningkatan nilai tambah dan daya saing usaha produktif masyarakat
3. Peningkatan Daya Saing Produk Unggulan Daerah
4. Peningkatan Pengembangan Usaha Dagang Kecil Menengah
5. Meningkatkan Efektivitas pengawasan barang/jasa dan tertib ukur

D. Kebijakan

Kebijakan adalah rumusan kerangka piker atau kerangka kerja untuk menyelesaikan permasalahan pembangunan dan mengantisipasi isu strategis Daerah/Perangkat Daerah yang dilaksanakan secara bertahap sebagai penjabaran strategi.

Dalam upaya mewujudkan tujuan, sasaran dengan misi yang ingin diwujudkan Dinas Perdagangan Kabupaten Bone, maka ditetapkanlah kebijakan sebagai berikut :

- a. Peningkatan Pelaksanaan Pemerintahan dan Peningkatan Kinerja
- b. Peningkatan dukungan Pembangunan Sarana dan Prasarana Perdagangan di wilayah potensial
- c. Mengamankan pasar domestik untuk meningkatkan daya saing produk Unggulan Daerah
- d. Peningkatan Pembinaan terhadap Usaha Dagang Kecil dan Menengah

- e. Peningkatan perlindungan terhadap konsumen

3.3 Program dan Kegiatan

3.3.1 Program Perangkat Daerah

Untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan maka pembangunan Bidang Bidang Perdagangan mengusulkan beberapa Program yaitu sebagai berikut :

- a. Program Perencanaan Pembangunan Daerah
- b. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
- c. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
- d. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
- e. Program Peningkatan Pengembanagan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan keuangan
- f. Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan
- g. Program Peningkatan dan Pengembangan Ekspor
- h. Program Peningkatan Efesiensi Perdagangan Dalam Negeri
- i. Program Pembinaan Pedagang Kaki Lima dan Asongan
- j. Pengembangan Perdagangan Dalam Negeri
- k. Program Pemberdayaan Usaha Dagang Kecil dan Menengah

3.3.2 Kegiatan Perangkat Daerah

Kegiatan Dinas Perdagangan Kabupaten Bone terdiri dari 2 Urusan dan 11 Program yaitu :

- 1. Urusan Wajib
 - a. Program Perencanaan Pembangunan Daerah, kegiatannya sebagai berikut:
 - 1. Penyusunan Rencana Perangkat Daerah
- 2. Urusan Pilihan
 - a. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran, kegiatannya sebagai berikut :
 - 1. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik;
Pelaksanaan Kegiatan ini yaitu dengan membayar tagihan Listrik,Air dan Telepon selama 12 Bulan

2. Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan;

Pelaksanaan Kegiatan ini yaitu pembayaran Honorarium PPTK, Honorarium Bulanan, KPA, PPK, Bendahara, Pengurus Barang, Verifikator, Operator, Pemeriksa Barang dll

3. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor;

Pada Kegiatan ini dilakukan pembelian Alat dan Bahan Pembersih sehingga menciptakan kondisi kantor yang lebih baik

4. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor ;

Pada Kegiatan ini dilakukan pembelian alat listrik /Penerangan

5. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan;

Pada kegiatan ini dilakukan pembayaran tagihan langganan Koran, Majalah dan Pembayaran Iklan

6. Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan Luar Daerah;

Pada Kegiatan ini hanya mencakup pembayaran SPPD dalam dan Luar Daerah dalam rangka koordinasi dan Konsultasi dengan Provinsi maupun dengan Pusat.

7. Pelaksanaan Administrasi Perkantoran.

Pada Kegiatan ini dilakukan pengadaan barang pakai habis berupa Alat Tulis Kantor, Penggandaan, Bahan Cetak dan Penyediaan Makan dan Minum Harian Pegawai

b. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur, kegiatannya sebagai berikut :

1. Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor;

2. Pengadaan Peralatan Gedung Kantor;

3. Pengadaan Mebeleur;

4. Pemeliharaan Rutin/ Berkala Gedung Kantor ;

5. Pemeliharaan Rutin/ Berkala Kendaraan Dinas /Operasional ;

6. Pemeliharaan Rutin/ Berkala Peralatan Gedung Kantor.

c. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur, kegiatannya sebagai berikut :

1. Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan perundang-undangan.

d. Program Peningkatan Pengembanagan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan keuangan, Kegiatannya sebagai berikut:

1. Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Iktisar Realisasi Kinerja SKPD

2. Monitoring dan Evaluasi Capaian Kinerja dan Keuangan

- e. Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan, kegiatannya sebagai berikut:
1. Peningkatan Pengawasan Peredaran Barang dan jasa
 2. Operasionalisasi dan Pengembangan UPT Kemetrollogian Daerah;
Pada Kegiatan dilakukan pengawasan dan Pelaksanaan Tera Ulang atas Timbangan yang digunakan oleh pengusaha.
 3. Monitoring Bahan Kebutuhan Pokok.
Monitoring dilakukan setiap hari pada 5 Pasar yang ada di kabupaten Bone dengan pelaporan dilakukan setiap minggu dan setiap bulan untuk memantau harga barang yang beredar tidak mengalami peningkatan.
 4. Pengawasan Alat UTTP dan BDKT;
 5. Penanganan Pengaduan Konsumen
- f. Program Peningkatan dan Pengembangan Ekspor, kegiatannya sebagai berikut :
1. Sosialisasi Kebijakan Penyederhanaan Prosedur dan Dokumen Ekspor dan Impor;
Kegiatan yang dilakukan adalah berupa sosialisasi yang dihadiri oleh pengusaha komoditi unggulan dan calon pengusaha yang mana materi diberikan oleh Dinas Perdagangan Provinsi Sulawesi Selatan
 2. Pengembangan Data Base Informasi Potensi Unggulan;
Dilakukan dengan cara pelaksanaan pendataan potensi unggulan yang ada di Kabupaten Bone
 3. Promosi Produk Daerah.
Dilakukan dengan ikut serta pada kegiatan Pameran Produk di beberapa daerah
- g. Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri, kegiatannya sebagai berikut :
1. Fasilitasi Kemudahan Perizinan Pengembangan Usaha;
Dilakukan dengan melakukan penyuluhan dan memfasilitasi masyarakat dalam pengambilan izin dalam hal pengembangan usaha.

2. Pengembangan Pasar Lelang Daerah;
Dilakukan dengan mengikutsertakan pengusaha dan calon pengusaha dalam hal kegiatan pasar lelang yang diadakan Dinas Perdagangan Provinsi Sulawesi Selatan.
 3. Fasilitas pasar Murah;
Dilakukan dengan pelaksanaan Pasar murah yang melibatkan distributor dan pembagian paket sembako.
 4. Pengembangan Sarana Penunjang Pasar
 5. Pengembangan Sarana dan Prasarana Perdagangan;
Dilakukan dengan Pembangunan/Revitalisasi Pasar Rakyat dengan menggunakan Dana Alokasi Khusus dari Kementerian ditambah dengan dana Alokasi Umum Daerah Kabupaten Bone
 6. Operasionalisasi Sistem Resi Gudang;
 7. Bimbingan Teknis Pengelola Pasar dan Pergudangan.
 8. Pengembangan Sarana dan Prasarana Perdagangan Pasar Desa
- h. Program Pembinaan Pedagang Kaki Lima dan Asongan kegiatannya sebagai berikut :
1. Penyuluhan Peningkatan Disiplin Pedagang Kaki Lima dan Asongan
 2. Penataan Tempat Berusaha bagi Pedagang Kaki Lima dan Asongan
- i. Pengembangan Perdagangan Dalam Negeri kegiatannya sebagai berikut
1. Pengembangan Sarana Distribusi Perdagangan
- j. Program Pemberdayaan Usaha Dagang Kecil dan Menengah kegiatannya sebagai berikut :
1. Pembinaan Peningkatan Promosi Produk Daerah
 2. Pelatihan Clean Produk dan Kemasan UDKM
 3. Bimbingan Teknis Pengolahan Komoditi Unggulan
 4. Pelatihan Kewirausahaan UDKM

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Rencana Kerja dan Pendanaan Dinas Perdagangan Tahun 2020 dibuat Untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan Rencana Kerja Pembangunan Daerah Bidang Perdagangan. Program dan Kegiatan yang akan dilaksanakan dalam rencana Kerja Dinas Perdagangan Tahun 2020 adalah sebagai berikut:

1. Urusan Wajib

- a. Program Perencanaan Pembangunan Daerah, kegiatannya sebagai berikut:

- 1. Penyusunan Rencana Perangkat Daerah dengan dana DAU sebesar Rp. 46.200.000,-

2. Urusan Pilihan

- a. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran, kegiatannya sebagai berikut :

- 1. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik dengan dana DAU sebesar Rp. 29.199.610,-;
- 2. Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan dengan dana DAU sebesar Rp.103.920.000,-;
- 3. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor dengan dana DAU sebesar Rp.12.026.000,-;
- 4. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor dengan dana DAU sebesar Rp.2.865.000,-;
- 5. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan dengan dana DAU sebesar Rp.30.250.000,-;
- 6. Rapat-rapat Kordinasi dan Konsultasi Dalam dan Luar Daerah dengan dana DAU sebesar Rp.282.315.000,-;
- 7. Pelaksanaan Administrasi Perkantoran dengan dana DAU sebesar Rp.99.625.900,-.

- b. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur, kegiatannya sebagai berikut :

- 1. Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor dengan dana DAU sebesar Rp.34.925.000,-;

2. Pengadaan Peralatan Gedung Kantor dengan dana DAU sebesar Rp.13.530.000,-;
 3. Pengadaan Mebeleur dengan dana DAU sebesar Rp.38.910.000,-;;
 4. Pemeliharaan Rutin/ Berkala Gedung Kantor dengan dana DAU sebesar Rp.38.750.000,-;
 5. Pemeliharaan Rutin/ Berkala Kendaraan Dinas /Operasional dengan dana DAU sebesar Rp.69.850.000,-;
 6. Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor dengan dana DAU sebesar Rp. 11.935.000,-;
 7. Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor dengan dana DAU sebesar Rp. 250.000.000,-;
- c. Program Peningkatan Disiplin Aparatur , Kegiatannya sebagai berikut:
1. Pengadaan Pakaian Korpri dengan dana DAU sebesar Rp. 8.400.000,-
 2. Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari tertentu dengan dana DAU sebesar Rp. 12.250.000,-
 3. Pengadaan Pakaian Dinas PNS beserta perlengkapannya dengan dana DAU sebesar Rp. 15.000.000,-
- d. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur, kegiatannya sebagai berikut :
1. Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan perundang-undangan dengan dana DAU sebesar Rp.104.500.000,-;
- e. Program Peningkatan Pengembanagan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan keuangan, Kegiatannya sebagai berikut:
1. Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Iktisar Realisasi Kinerja SKPD dengan dana DAU sebesar Rp.39.723.950,-;
 2. Monitoring dan Evaluasi Capaian Kinerja dan Keuangan dengan dana DAU sebesar Rp. 32.890.000,-;
- f. Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan, kegiatannya sebagai berikut:
1. Peningkatan Pengawasan Peredaran Barang dan jasa dengan dana DAU sebesar Rp.25.000.000,-;
 2. Monitoring Bahan Kebutuhan Pokok dengan dana DAU sebesar Rp.40.000.000,-;
 3. Pengawasan Alat UTTP dan BDKT dengan dana DAU sebesar Rp.40.000.000,-;

4. Penanganan Pangaduan Konsumen dana DAU sebesar Rp.20.000.000,-

g. Program Peningkatan dan Pengembangan Ekspor, kegiatannya sebagai berikut :

1. Sosialisasi Kebijakan Penyederhanaan Prosedur dan Dokumen Ekspor dan Impor dengan dana DAU sebesar Rp.14.702.600,-;
2. Pengembangan Data Base Informasi Potensi Unggulan dengan dana DAU sebesar Rp.14.311.000,-;
3. Promosi Produk Daerah dengan dana DAU sebesar Rp.141.900.000,- ;.

h. Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri, kegiatannya sebagai berikut :

1. Fasilitasi Kemudahan Perizinan Pengembangan Usaha dengan dana DAU sebesar Rp.22.000.000,-;
2. Pengembangan Pasar Lelang Daerah dengan dana DAU sebesar Rp.17.600.000,-;
3. Fasilitasi pasar Murah dengan dana DAU sebesar Rp.175.161.000,-;
4. Pengembangan Sarana Penunjang Pasar dengan dana DAU sebesar Rp.283.862.400,-;
5. Pengembangan Sarana dan Prasarana Perdagangan dengan dana DAK + DAU sebesar Rp.5.775.000.000,-;
6. Sistem Resi Gudang dengan dana DAU sebesar Rp.250.000.000,-;
7. Bimbingan Teknis Pengelola Pasar dan Pergudangan dengan dana DAU sebesar Rp.30.300.000,-;
8. Pengembangan Sarana dan Prasarana Perdagangan Pasar Desa dengan dana DAU sebesar Rp.300.791.400,-;

i. Program Pembinaan Pedagang Kaki Lima dan Asongan kegiatannya sebagai berikut :

1. Penyuluhan Peningkatan Disiplin Pedagang Kaki Lima dan Asongan dengan dana DAU sebesar Rp.11.381.700,-;
2. Penataan Tempat Berusaha Bagi Pedagang Kaki Lima dan Asongan dengan dana DAU sebesar Rp. 350.000.000,-

j. Program Pemberdayaan Usaha Dagang Kecil dan Menengah kegiatannya sebagai berikut :

1. Pembinaan Peningkatan Promosi Produk Daerah dengan dana DAU sebesar Rp.12.100.000,-;
2. Pelatihan Clean Produk dan Kemasan UDKM dengan dana DAU sebesar Rp.12.100.000,-;



Tabel 4.1
Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Tahun 2020
Dan Perkiraan Maju Tahun 2021
Dinas Perdagangan kabupaten Bone

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN			INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2020				CATATAN PENTING	RENCANA TAHUN 2021	
					LOKASI	TARGET CAPAIAN	KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN	KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF
(1)	(2)			(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
2				URUSAN PILIHAN			8.813.275.560,00				9.664.129.187,00
2	6			PERDAGANGAN			8.813.275.560,00				9.664.129.187,00
2	6	1		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan Ketersediaan Pelayanan Administrasi Perkantoran	95 %	560.201.510,00			95 %	617.546.127,00
2	6	1	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik	Jumlah Rekening Pembayaran T	Dinas Perdagangan	36 Rekening	29.199.610,00	DAU	36 Rekening	32.119.571,00
2	6	1	7	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Jumlah Tenaga Sukarela yang dib	Dinas Perdagangan	25 Kali	103.920.000,00	DAU	25 Kali	109.611.936,00
2	6	1	8	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Jumlah Paket Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Dinas Perdagangan	1 Paket	12.026.000,00	DAU	1 Paket	19.252.580,00
2	6	1	12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Penyediaan Kompo	Dinas Perdagangan	1 Paket	2.865.000,00	DAU	1 Paket	3.152.050,00
2	6	1	15	Penyediaan Bahan Bacaan Dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Media Penyedia Bahan B	Dinas Perdagangan	10 Media	30.250.000,00	DAU	10 Media	33.275.000,00
2	6	1	23	Rapat-rapat Kordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah dan Luar Daerah	Jumlah Paket Pelaksanaan Rapat	Dinas Perdagangan	120 Kegiatan	282.315.000,00	DAU	120 Kegiatan	310.546.500,00
2	6	1	24	Pelaksanaan Administrasi Perkantoran	Jumlah Paket Penunjang Pelaksa	Dinas Perdagangan	4 Paket	99.625.900,00	DAU	4 Paket	109.588.490,00
2	6	2		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Cakupan Realisasi Peningkatan Sarana dan Prasarana Ap	100 %	457.900.000,00			100 %	499.289.000,00

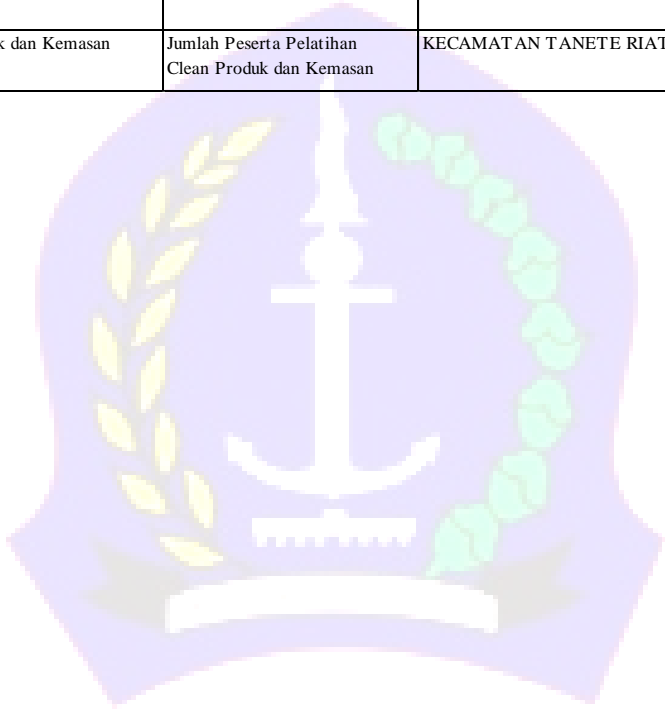
KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PRO GRAM/KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2020				CATATAN PENTING	RENCANA TAHUN 2021	
			LOKASI	TARGET CAPAIAN	KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN	KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
2 6 2 7	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Jumlah Paket Pengadaan	Dinas Perdagangan	5 Paket	34.925.000,00	DAU		5 Paket	38.417.500,00
2 6 2 9	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Jumlah Paket Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Dinas Perdagangan	3 Paket	13.530.000,00	DAU		3 Paket	14.883.000,00
2 6 2 10	Pengadaan Mebeleur	Jumlah Pengadaan Pengadaan Mebeleur	Dinas Perdagangan	10 Unit	38.910.000,00	DAU		12 Unit	48.400.000,00
2 6 2 22	Pemeliharaan Rutin/berkala Gedung Kantor	Jumlah Gedung Kantor yang Terpelihara	Dinas Perdagangan	1 Unit	38.750.000,00	DAU		1 Unit	42.625.000,00
2 6 2 24	Pemeliharaan Rutin/berkala Kendaraan Dinas/operasional	Jumlah Paket Pemeliharaan Rutin	Dinas Perdagangan	1 Paket	69.850.000,00	DAU		1 Paket	76.835.000,00
2 6 2 28	Pemeliharaan Rutin/berkala Peralatan Gedung Kantor	Jumlah Paket Penyediaan Pemeliharaan	Dinas Perdagangan	1 Paket	11.935.000,00	DAU		1 Paket	13.128.500,00
2 6 2 45	Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor	Jumlah Paket Rehab Gedung Kantor	Dinas Perdagangan	1 Paket	250.000.000,00	DAU		1 Paket	265.000.000,00
2 6 3	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Cakupan Peningkatan Disiplin Aparatur		100 %	35.650.000,00			100 %	23.500.000,00
2 6 3 4	Pengadaan Pakaian Korpri	Jumlah Pengadaan Pakaian Korpri	Dinas Perdagangan	23 Lembar	8.400.000,00	DAU		0 Lembar	0,00
2 6 3 5	Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu	Jumlah Penerima Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu	Dinas Perdagangan	49 Pasang	12.250.000,00	DAU		49 Pasang	23.500.000,00
2 6 3 6	Pengadaan Pakaian Dinas PNS beserta Perlengkapannya	Jumlah Pengadaan Pakaian Dinas dan Perlengkapannya	Dinas Perdagangan	50 Pasang	15.000.000,00	DAU		0 Pasang	0,00
2 6 5	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Cakupan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur		90 %	104.500.000,00			90 %	114.950.000,00
2 6 5 3	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	Jumlah PNS yang mewngikuti Bimbingan Teknis	Luar Daerah Dalam dan Luar Provinsi	8 Orang	104.500.000,00	DAU		8 Orang	114.950.000,00
2 6 6	Program Peningkatan Pengembangan	Cakupan Realisasi Penyusunan Dokumen Pelaporan Capaian		100 %	72.613.950,00			100 %	79.981.000,00

KODE				URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PRO GRAM/KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2020				CATATAN PENTING	RENCANA TAHUN 2021	
						LOKASI	TARGET CAPAIAN	KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN	KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF
(1)				(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
2	6	6	1	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen Pelaporan Capaian Kinerja	Dinas Perdagangan	3 Dokumen	39.723.950,00	DAU		3 Dokumen	43.802.000,00
2	6	6	17	Monitoring dan Evaluasi Capaian Kinerja dan Pelaksanaan Kebijakan Perdagangan	Jumlah Kegiatan Monitoring dan Evaluasi	Dinas Perdagangan	10 Kegiatan	32.890.000,00	DAU		10 Kegiatan	36.179.000,00
2	6	8		Program Penunjang Pemerintahan Umum	Cakupan Realisasi Kegiatan Penunjang Pemerintahan Umum		100 %	46.200.000,00			100 %	50.820.000,00
2	6	8	1	Penyusunan Rencana Perangkat Daerah	Jumlah Jenis Dokumen Perencanaan	Dinas Perdagangan	1 Dokumen	46.200.000,00	DAU		1 Dokumen	50.820.000,00
2	6	15		Program Perlindungan Konsumen Dan Pengamanan Perdagangan	Cakupan Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan		90 %	125.000.000,00			95 %	137.500.000,00
2	6	15	3	Peningkatan Pengawasan Peredaran Barang Dan Jasa	Jumlah Kegiatan Pengawasan Peredaran Barang dan Jasa	Tersebar di Kecamatan Kota	24 Kegiatan	25.000.000,00	DAU		24 Kegiatan	27.500.000,00
2	6	15	5	Monitoring Bahan Kebutuhan Pokok	Jumlah Laporan Harga Kebutuhan Pokok	5 Pasar dalam kota	48 Laporan	40.000.000,00	DAU		48 Laporan	44.000.000,00
2	6	15	6	Penanganan Pengaduan Konsumen	Jumlah Laporan Penyelesaian Pengaduan	Dinas Perdagangan	1 Laporan	20.000.000,00	DAU		1 Laporan	22.000.000,00
2	6	15	7	Pengawasan Alat UUTP dan BDKT	Jumlah Alat-alat UTTP yang diawasi	Tersebar di 27 Kecamatan	100 Unit	40.000.000,00	DAU		100 Unit	44.000.000,00
2	6	17		Program Peningkatan Dan Pengembangan Ekspor	Persentase Ketersediaan Data Potensi Unggulan		85 %	170.913.600,00			90 %	188.004.960,00
2	6	17	3	Sosialisasi Kebijakan Penyederhanaan Proses	Jumlah Peserta Sosialisasi	Dinas Perdagangan	20 Orang	14.702.600,00	DAU		20 Orang	16.172.860,00
2	6	17	4	Pengembangan Data Base Informasi Potensi Unggulan	Data Potensi Unggulan Kabupaten	Dinas Perdagangan	1 Dokumen	14.311.000,00	DAU		1 Dokumen	15.742.100,00
2	6	17	13	Promosi Produk daerah	Jumlah Pelaksanaan Promosi Produk Daerah	Dalam dan Luar Daerah	4 Kali	141.900.000,00	DAU		4 Kali	156.090.000,00

KODE				URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2020				CATATAN PENTING	RENCANA TAHUN 2021	
						LOKASI	TARGET CAPAIAN	KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN	KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF
(1)				(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
2	6	18		Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negri	Cakupan Rehabilitasi dan Revitalisasi Pasar		12 %	6.854.714.800,00			14 %	7.528.398.230,00
2	6	18	2	Kemudahan Perijinan Pengembangan Usaha	Meningkatnya penerbitan Izin Perdagangan (HO)	Watampone	100 Persen	22.000.000,00	DAU		100 Persen	24.200.000,00
2	6	18	5	Pengembangan Pasar Lelang Daerah	Jumlah Peserta Pasar Lelang	Luar Daerah dalam Provinsi	5 Orang	17.600.000,00	DAU		5 Orang	19.360.000,00
2	6	18	8	Pasar Murah	Jumlah Pelaksanaan Pasar Murah	3 Kecamatan	3 Kali	175.161.000,00	DAU		3 Kali	183.919.050,00
2	6	18	10	Pengembangan Sarana Penunjang Pasar	Jumlah Sarana Penunjang Pasar yang Terbangun	5 Kecamatan	5 Unit	283.862.400,00	DAU		5 Unit	312.248.640,00
						Desa Lebbae (Kecamatan Ajangale)						
						Desa Pacing (Kecamatan Awangpone)						
						Kelurahan Maccope						
						Pasar Mare						
2	6	18	11	Pengembangan Sarana dan Prasarana Perdagangan Rakyat	Jumlah Pasar Baru yang terbangun	3 Kecamatan	3 Unit	5.775.000.000,00	DAU		3 Unit	6.352.500.000,00
						Desa Patimpeng (Kecamatan Patimpeng)						
						Dusun Muttiara (Kecamatan Lamuru)						
						Lerang I (Kecamatan Cina)						
						Lingkungan Camming (Kecamatan Libureng)						
						Tacipi (Kecamatan Ulaweng)						
2	6	18	13	Sistem Resi Gudang	Jumlah Gudang yang Terpelihara	Kecamatan Dua Boccoe	2 Unit	250.000.000,00	DAU		2 Unit	275.000.000,00
2	6	18	14	Bimbingan Teknis Pengelola Pasar dan Pergudangan	Jumlah Bimtek Pengelola Pasar yang diikuti	Luar Daerah	1 Kegiatan	30.300.000,00	DAU		1 Kegiatan	30.300.000,00

KODE				URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2020				CATATAN PENTING	RENCANA TAHUN 2021	
						LOKASI	TARGET CAPAIAN	KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN	KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF
(1)				(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
2	6	18	17	Pengembangan Sarana dan Prasarana Perdagangan Pasar Desa	Jumlah Pasar Desa yang di Rehabilitasi	5 Kecamatan	5 Unit	300.791.400,00	DAU		5 Unit	330.870.540,00
						Desa Pacing						
						Desa Parippung (Kecamatan Barebbo)						
						Desa Tadang Palie (Kecamatan Ulaweng)						
						Dusun II (Kecamatan Awangpone)						
						Dusun III (Kecamatan Awangpone)						
						DUSUN MATAJANG (Kecamatan Ponre)						
						Dusun Mauleng (Kecamatan Tellu Siattinge)						
						Dusun Pajjia (Kecamatan Sibulue)						
						Dusun Paku (Kecamatan Bonto Cani)						
						Dusun Tinco (Kecamatan Libureng)						
						Dusun Tobenteng (Kecamatan Amali)						
						Kalampange (Kecamatan Barebbo)						
						Keluraha Maroanging (Kecamatan Sibulue)						
						MATTIROWALIE (Kecamatan Tellu Siattinge)						
2	6	19		Program Pembinaan Pedagang Kaki Lima Dan Asongan	Cakupan Bina Pedagang Kaki Lima dan Asongan		30 %	361.381.700,00			40 %	397.519.870,00

KODE				URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2020				CATATAN PENTING	RENCANA TAHUN 2021	
						LOKASI	TARGET CAPAIAN	KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN	KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF
(1)				(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
2	6	19	2	Kegiatan Penyuluhan Peningkatan Disiplin	Jumlah Peserta Sosialisasi	Dinas Perdagangan	20 Orang	11.381.700,00	DAU		20 Orang	12.519.870,00
2	6	19	3	Kegiatan Penataan Tempat Berusaha Bagi Pedagang Kakilima Dan Asongan	Jumlah Paket Bantuan Pedagang	Kecamatan Tellu Siatinge	2 Paket	350.000.000,00	DAU		2 Paket	385.000.000,00
2	6	21		Program Pemberdayaan Usaha Dagang Kecil dan Menengah	Cakupan Bina Usaha/UKM		30 %	24.200.000,00			40 %	26.620.000,00
2	6	21	1	Pembinaan Peningkatan Promosi Produk UDKM	Jumlah Peserta Pembinaan Penin	Dinas Perdagangan	20 Orang	12.100.000,00	DAU		20 Orang	13.310.000,00
2	6	21	2	Pelatihan Clean Produk dan Kemasan UDKM	Jumlah Peserta Pelatihan Clean Produk dan Kemasan	KECAMATAN TANETE RIAT	20 Orang	12.100.000,00	DAU		20 Orang	13.310.000,00



BAB V

PENUTUP

Rencana Kerja (RENJA) Dinas Perdagangan Kabupaten Bone Tahun 2020 merupakan salah satu indikasi Pemerintah Daerah Kabupaten Bone yang dituangkan dalam bentuk program dan kegiatan untuk dijadikan acuan dalam menyusun kebijakan umum Anggaran Pendapatan Belanja Daerah serta Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA SKPD) Tahun Anggaran 2020. Rencana Kerja ini disusun dan dibuat berdasarkan mekanisme yang ada yaitu atas masukan dan hasil penyaringan dari berbagai pihak yang terkait.

Untuk itu keikutsertaan Stakeholder (Pemerintah, masyarakat dan Swasta) terhadap pelaksanaan program dan kegiatan sebagaimana tersebut di atas sangat menentukan dalam pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan Daerah Kabupaten Bone.